

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM  
PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK) SEBAGAI UPAYA  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**(Studi di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian sarjana**

**Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**NITA TRI WAHYUNI**

**0310313072-31**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**

**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH**

**MALANG**

**2007**

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Januari 2008

Mahasiswa

Nama : Nita Tri Wahyuni  
NIM : 0310313072

## RINGKASAN

Nita Tri Wahyuni, 2007. **Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan (Studi di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Mojo).**

Dosen Pembimbing: Drs. Trilaksono Nugroho, M.S dan Drs. Sukanto, M.S  
(74 hal+i-xi)

Permasalahan yang selalu membayangi pelaksanaan di Indonesia adalah masih tingginya angka kemiskinan. Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah memandang perlu meningkatkan bantuan pembangunan kepada masyarakat desa melalui pengelolaan di tingkat kecamatan yaitu Bantuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan PPK dalam memberdayakan masyarakat dan untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan PPK serta untuk mengetahui faktor pendukung maupun faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Mojo.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan dengan cermat dan akurat sesuai dengan kenyataan yang ada secara sistematis, dengan mengambil situs penelitian di Desa Mojo, tempat kegiatan PPK untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, peneliti mengambil data dari pelaku PPK serta arsip-arsip dan dokumen yang ada di tempat penelitian. Untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah data dikumpulkan langkah selanjutnya adalah menyajikannya, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa pelaksanaan PPK di Desa Mojo telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada mulai dari sosialisasi PPK pada masyarakat, perencanaan, pelaksanaan kegiatan, hingga pelestarian berjalan seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan yang berhasil dijalankan diantaranya kegiatan sarana prasarana yaitu pembangunan saluran irigasi dan kegiatan ekonomi produktif kelompok perempuan. Namun demikian dalam pelaksanaan PPK tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung antara lain: partisipasi masyarakat, adanya kerjasama dengan pemerintah desa dengan masyarakat, kelancaran pengembalian dana simpan pinjam, adanya transparansi dari pelaku PPK. Faktor penghambat yaitu pengerasan makadam yang tertunda karena harus menunggu pinjaman wareles dari Dinas Kimpraswil.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PPK di Desa Mojo sudah berjalan cukup baik dan lancar dengan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan hasil pelaksanaan PPK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Saran yang dapat peneliti kemukakan adalah pemerintah lebih jelas menjelaskan kepada masyarakat tentang pencairan dana dan penggalan dana dari masyarakat, meningkatkan kerjasama dan koordinasi yang baik dari pelaku PPK, aparat desa dan masyarakat.

## SUMMARY

Nita Tri Wahyuni, 2007. Empowerment the society in the district development program (PPK) as an Effort to overcome the proverty (Study at Mojo village of Mojo district in kediri Regency). Counsellor lecturer: Drs. Trilaksono Nugroho, MS and Sukanto, Ms (74 page + i – xi).

The problems that always shadow the implementation of an effort to overcome the poverty is the poverty value still high. As an effort to overcome the poverty, the goverment looks that is necessary to improve the development aid to village society by manging in the district that is District Development Program (PPK).

This research purpose is to know how the implementation of PPK in empowering the society the result from the implementation of PPK also the support and obstacle that faced in an effort to overcome the society in mojo village.

This research methodology used descriptive method with quality Approach is to describe the phenomenon that happen in the field occurately is suitable with the reality by taking research location in mojo village, the activity place of PPK to get the relevant data from PKK actor also archieves and documents are in the research place. For collecting the data, the researcher use interview, observation and documentation technique. After the data have been collected the next step is present it, then analysed and interpreted.

According to the result of research in the field. Show that the implementation of PKK in Mojo Village have been done succesfully with the procedur from the socialization of PPK to the society. The planning, the implementation of activities, until the remain can walk as hoped. This case can be looked from the activities that have succeeded that consist of fasility activities such as the irrigation development and the productive economy activity of women group. Nevertheless, the implementation of PPK can't free from the support and obstacle factors. The support factors such as the society participation, the cooperation between village goverment with society, the returning from saving loan quickly, the transparancy from PPK actors. The obstacle factor is to harden the brokenroad because must wait the borrowing of wareless from kimpraswil department.

From this research can be concluded is the implementation of PPK in Mojo village have succeeded the society participation in of the result of PPK Implementation as an Effort to overcome the poverty. The suggestion from the researcher is the goverment can explain clearly to the society about the liquidation the fund and collecting the fund from the society, improve the cooperation and coordination well. From the PPK actors, village officials and society.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan” yang dilaksanakan di Studi Pada Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik/Bisnis pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. DR. Suhadak, MEC selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
2. Bapak Drs. Trilaksono Nugroho, M.S dan Bapak Drs. Sukanto, M.S selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing, mengarahkan dan menasehati penulis.
3. Bapak Drs. Asmu’i selaku Ketua Unit Pengelola Keuangan (UPK) Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang telah memberikan informasi dan bantuannya.
4. Ibu Sri Andayani yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan kerjasamanya.

5. Bapak Untung Koini selaku Kepala Urusan umum yang telah memberikan informasi dan bantuannya.
6. Bapak Hadi Sofa selaku Sekretaris Desa yang telah memberikan informasi dan bantuannya.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini bermanfaat bagi khasanah ilmu pengetahuan serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Skripsi ini merupakan bentuk sebuah ekspresi pemikiran penulis yang melihat adanya fenomena bahwa Indonesia sampai saat ini belum bisa lepas dari masalah kemiskinan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Januari 2008

Penulis



**DAFTAR ISI**

Halaman

<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI</b>	
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b>	
<b>RINGKASAN</b> .....	i
<b>SUMMARY</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	x
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kontribusi Penelitian .....	4
E. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Otonomi Daerah dan Teori Pembangunan	
1. Otonomi Daerah .....	6
a. Pengertian Otonomi Daerah .....	6
b. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah .....	6
c. Tujuan Otonomi Daerah .....	7
2. Teori Pembangunan .....	8
a. Perkembangan Paradigma Pembangunan .....	8
b. Peran Rakyat dalam Pembangunan .....	10
B. Kemiskinan	
1. Pengertian Kemiskinan .....	12
2. Konsep Kemiskinan .....	14

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan.....	17
C. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi	
1. Pemberdayaan Masyarakat .....	18
a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .....	18
b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat .....	19
c. Permasalahan dalam Pemberdayaan Masyarakat .....	19
d. Tahap-tahap Pemberdayaan Masyarakat .....	21
2. Partisipasi .....	22
a. Pengertian Partisipasi .....	22
b. Partisipasi dalam Pemberdayaan .....	23
D. Program Pengembangan Kecamatan (PPK).....	25
1. Pengertian Program.....	25
2. Pengertian PPK .....	26
3. Azas dan Prinsip PPK .....	27
4. Tujuan PPK .....	28
5. Sasaran Kelompok dan Lokasi PPK .....	29
6. Pelaku PPK .....	29

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Fokus penelitian .....	32
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	33
D. Sumber Data dan Jenis Data .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Instrumen Penelitian .....	35
G. Analisis Data .....	35

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Penyajian Data	
1. Gambaran Umum	
a. Gambaran Umum Desa Mojo .....	37
1. Luas dan Batas Wilayah.....	37

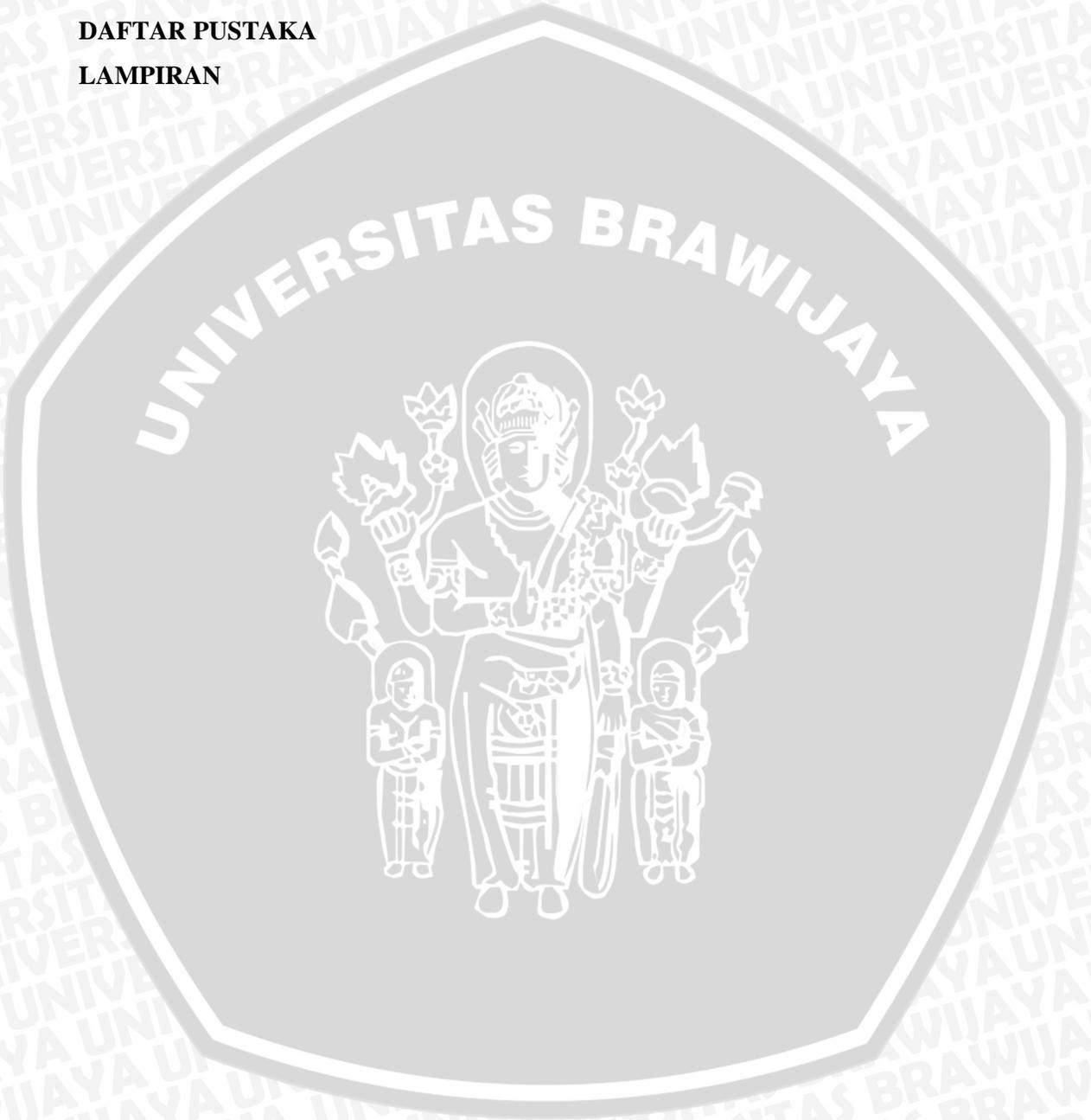
2.	Daftar Wilayah Administratif .....	38
3.	Jumlah Penduduk .....	38
4.	Kondisi Pemerintahan .....	39
b.	Deskripsi Pelaksanan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) .....	43
2.	Data Fokus	
a.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Mojo.....	47
1.	Tahap perencanaan .....	47
2.	Tahap Pelaksanaan .....	54
3.	Tahap Pelestarian.....	56
b.	Upaya penanggulangan kemiskinan dalam PPK di Desa Mojo.....	59
1.	Pembangunan Sarana Dan Prasarana.....	59
2.	Kegiatan Ekonomi Produktif .....	60
c.	Faktor penghambat dan faktor pendukung PPK.....	62
1.	Faktor Pendukung .....	62
2.	Faktor Penghambat .....	63
B.	Analisis dan Interpretasi Data	
a.	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Mojo .....	63
1.	Tahap Perencanaan .....	63
2.	Tahap Pelaksanaan .....	66
3.	Tahap Pelestarian .....	66
b.	Upaya penanggulangan kemiskinan dalam PPK di Desa Mojo	
1.	Pembangunan sarana dan prasarana.....	67
2.	Kegiatan Ekonomi Produktif .....	68
c.	Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung PPK	
1.	Faktor Pendukung .....	70
2.	Faktor Penghambat .....	71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

No	Judul	Hal
1	Perkembangan Paradigma Pembangunan	9
2	Pendanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)	30
3	Data Kependudukan Desa M ojo	38
4	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Desa Mojo Keadaan Tahun 2006	38
5	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Mojo Keadaan Tahun 2006	39
6	Tingkat Pendidikan Aparat Desa Mojo	41
7	Data Kependudukan Desa Mojo Tahun 2006	48
8	Tabel Gagasan untuk Musyawarah Khusus Perempuan	50
9	Daftar Usulan Kegiatan Desa Yang Menerima Dana Bantuan PPK Tahun Anggaran 2006	53
10	Proses Pencairan Dana PPK Desa Mojo Tahun Anggaran 2006/2007	56
11	Rekapitulasi Anggaran Biaya PPK Desa Mojo Tahun Anggaran 2006/2007	56
12	Perkembangan Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan	62

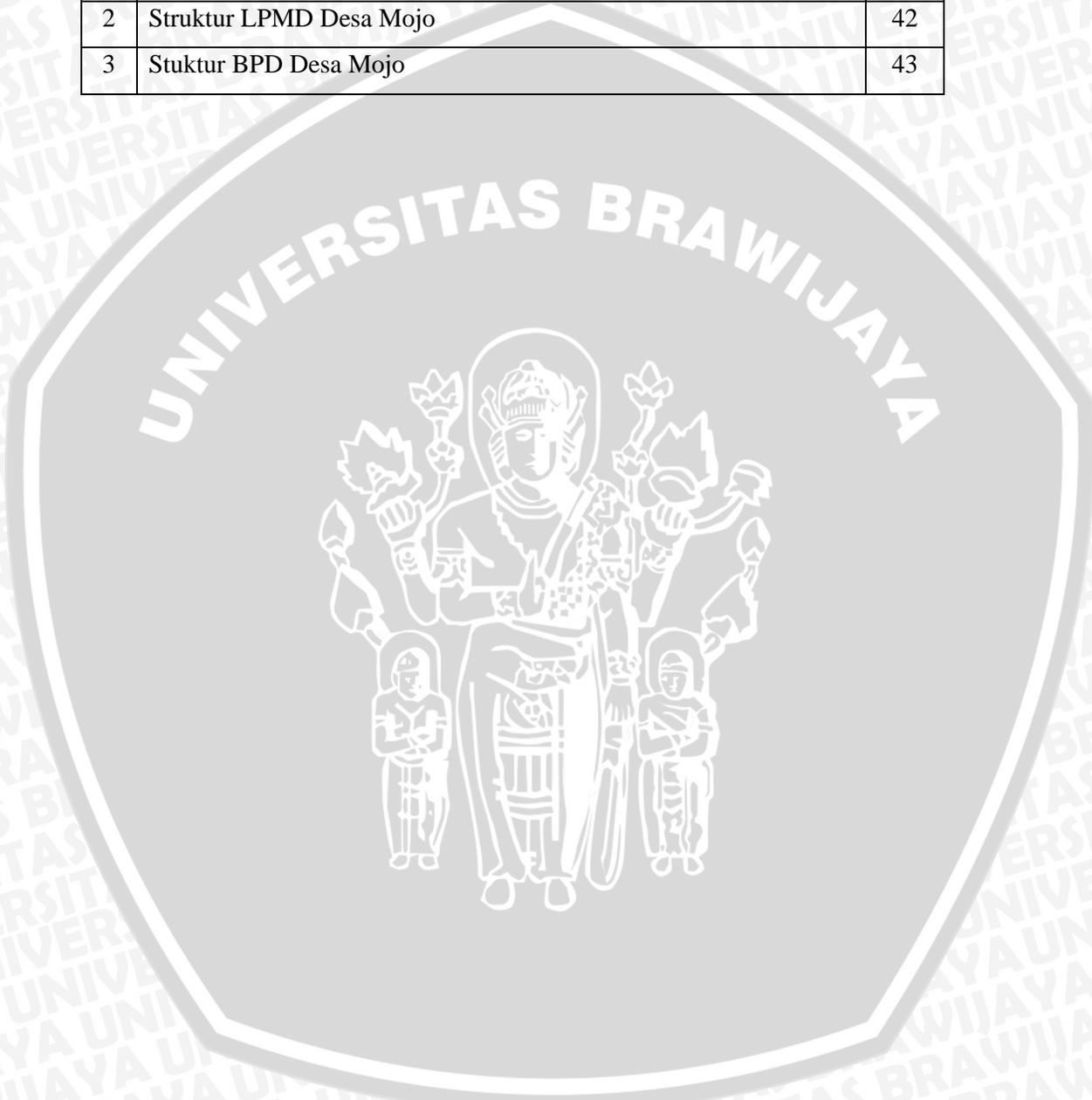
**DAFTAR GAMBAR**

No	Judul	Hal
1	Analisis Data Model Interaktif Miles Dan Huberman	36
2	Peta Lokasi Desa Mojo	37



**DAFTAR BAGAN**

No	Judul	Hal
1	Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Desa Mojo	40
2	Struktur LPMD Desa Mojo	42
3	Stuktur BPD Desa Mojo	43



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemiskinan sebagian warga masyarakat di Indonesia sudah sejak dahulu menjadi persoalan, dan pemerintah telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangnya. Kemiskinan yang ditandai dengan pengangguran, rendahnya kualitas SDM dan produktivitas, terbatasnya modal yang dimiliki, lemah dalam kemampuan berusaha, dan sangat terbatasnya akses kepada kegiatan ekonomi serta terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan adalah menjadi tanggungjawab bersama.

Kemiskinan merupakan masalah nasional yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Penyebab kemiskinan merupakan suatu kompleksitas serta hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan dari ketidakberdayaan (*powerlessness*) dan perangkat lainnya. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) dipandang sebagai suatu upaya untuk memperluas upaya penanggulangan kemiskinan dengan memampukan dan menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru dalam pembangunan karena didasari bahwa paradigma yang meletakkan peranan negara atau pemerintah pada posisi sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan justru menjadi faktor penghambat pembangunan itu sendiri. Paradigma pemberdayaan itu berdiri pada suatu pemikiran bahwa pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat ini fungsi pemerintah adalah sebagai fasilitator, dimana fungsi utama fasilitator adalah menciptakan lingkungan dimana masyarakat dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan koordinasi dari berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilakukan di pusat, daerah kota maupun di daerah pedesaan yang diharapkan dapat berdampak besar terhadap upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat terutama masalah kemiskinan.

Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah memandang perlu meningkatkan bantuan pembangunan kepada masyarakat desa melalui pengelolaan di tingkat kecamatan yaitu bantuan Program Pengembangan Kecamatan PPK. Dalam rangka mendukung lebih lanjut pelaksanaan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan yang kemudian disebut Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang berlangsung pada tahun 1998 sampai dengan sekarang, khususnya untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dengan cakupan lebih luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan.

Sejalan dengan otonomi daerah sebagai pelaksanaan UU No. 32 Tahun 2004, maka terdapat perubahan mendasar dalam paradigma pembangunan daerah, karena adanya peodelegasian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam kerangka otonomi daerah, maka PPK dikembangkan sebagai media pembelajaran dan pengembangan kapasitas pelaku pembangunan dan media aktualisasi prakarsa masyarakat dalam sebuah kegiatan pembangunan bersama.

Kegiatan ini dilakukan melalui pengelolaan bantuan masyarakat desa ditingkat kecamatan. Pelaksanaan program ini khususnya untuk meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan usaha produktif dan pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dengan cakupan lebih luas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pedesaan. Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini juga diarahkan untuk menangani daerah yang mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan pengangguran dan bencana kekeringan dan menyebabkan rawan pangan.

Dana bantuan PPK merupakan dana yang disalurkan kepada desa melalui kecamatan. Dana tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan kegiatan usaha produktif dan pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung langsung kegiatan sosial ekonomi masyarakat pedesaan.

Jenis kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat desa ditetapkan berdasarkan musyawarah di tingkat desa melalui wadah Musyawarah Desa (MD) dan disetujui pembiayaannya oleh lembaga musyawarah di kecamatan yang terdiri dari Camat, Kades, Ketua LPMD, BPD, wakil perempuan dan tokoh masyarakat melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD).

Dalam pengelolaan kegiatan usaha atau pembangunan sarana dan prasarana tersebut harus dilakukan langsung oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestariannya, dengan menerapkan pendekatan partisipatif dan padat karya, sehingga makin banyak masyarakat memperoleh manfaat dalam hal pengalaman keterampilan dan pendapatan.

Salah satu langkah agar pelaksanaan pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan ini dapat berjalan dengan baik, masyarakat dilibatkan langsung untuk memikirkan dan mencari solusi atau pemecahan masalah pada dirinya sendiri. Tanggapan yang positif dari masyarakat akan dapat mendukung pelaksanaan program sehingga program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan akan berdampak pada peningkatan taraf hidupnya.

Pelaksanaan PPK Desa Mojo dimulai tanggal 13 September 2006 sampai tanggal 13 Nopember 2006 berjalan 3 bulan. Dalam pelaksanaannya PPK memerlukan proses sosialisasi baik dari pihak masyarakat sendiri maupun dari pihak pemerintah desa. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelestariannya, dengan menerapkan pendekatan partisipatif dan padat karya, sehingga makin banyak masyarakat memperoleh manfaat dalam hal pengalaman, keterampilan dan pendapatan.

Sehubungan dengan uraian tersebut, penelitian ini akan mengambil lokasi di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, dengan pertimbangan bahwa desa tersebut sesuai dengan substansi penelitian. Dimana dilihat jumlah penduduk miskin di Desa Mojo berjumlah 537 Kepala Keluarga dari jumlah keseluruhan Kepala Keluarga yakni 763 Kepala Keluarga. Selain itu Desa Mojo sudah 4 kali mendapat bantuan PPK. Dilihat dari jumlah penduduk miskinnya maka masyarakat Desa Mojo masih tergolong dalam kategori miskin.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk lebih memahami tentang “Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan (studi di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sejalan dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapatlah ditarik rumusan masalahnya, yaitu :

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan PPK di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ?
3. Bagaimana pencapaian hasil pelaksanaan PPK di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan PPK di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.
3. Untuk mendeskripsikan pencapaian hasil pelaksanaan PPK di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Adapun kontribusi yang hendak yang dapat petik dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran memperkaya teori dalam bidang ilmu pengetahuan sosial khususnya Ilmu Administrasi Publik.
  - b. Bagi peneliti sendiri untuk mengetahui, memahami, dan menambah pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
2. Kegunaan Praktis
  - a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang terkait berupa sumbangan pemikiran dan informasi dalam pelaksanaan suatu program untuk penanggulangan kemiskinan yang dilakukan berdasarkan paradigma yang sedang berkembang saat ini, yaitu pemberdayaan masyarakat (*empowerment*).
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi pembanding bagi peneliti-peneliti yang telah lalu dan sebagai bahan referensi bagi peneliti

berikutnya yang tertarik dan ingin mendalami penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

#### E. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui secara garis besar yang dideskripsikan dalam penulisan skripsi ini, maka hal ini dapat dilihat dalam sistematika pembahasan yang merupakan susunan keseluruhan skripsi secara singkat.

1. **Bab I**, pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisi rumusan masalah, tujuan, serta manfaat.
2. **Bab II**, pada bab ini merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi teori tentang otonomi daerah dan pembangunan, kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi, serta Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
3. **Bab III**, pada bab ini merupakan bab metode penelitian yang berisi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data.
4. **Bab IV**, pada bab ini merupakan bab hasil dan pembahasan, yang diuraikan dalam penyajian data dan analisis data.
5. **Bab V**, pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan berisikan tentang kesimpulan dari seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya dan saran yang mendukung untuk melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang sejenis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Otonomi Daerah dan Teori Pembangunan

##### 1. Otonomi Daerah

###### a. Pengertian Otonomi Daerah

Menurut Kingsley (dalam Soeprapto, 2001, h.2) Otonomi Daerah yang tepat bukan hanya sekedar reorientasi paradigma *self local government* menjadi *self local governance* tetapi harus ditindaklanjuti dengan restrukturisasi pelaksanaan otonomi daerah yang sarat dengan kebebasan (*liberty*), partisipasi (*participation*), demokrasi (*democracy*), akuntabilitas (*accountability*).

Sedangkan menurut Priyatmoko dalam (Haryadi et. al, 2000, h.15) mengartikan otonomi daerah sebagai berikut:

- 1) Rakyat atau masyarakat setempat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.
- 2) Pemerintah atau pemegang kekuasaan politik akan lebih responsive dan akomodatif terhadap tuntutan rakyat, lebih bertanggungjawab, dan transparan dalam menjalankan kekuasaannya.
- 3) Pemerintah rela berbagi kekuasaan dengan rakyat atau berbagai komponen dalam masyarakat.
- 4) Terbuka kesempatan untuk saling belajar dan saling mengoreksi kearah penyelenggaraan *good and clean governance*.
- 5) Rakyat dan aparat pemerintah harus lebih aktif dan kreatif mencari jalan untuk memajukan kehidupan bersama.
- 6) Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta pengelolaan sumber daya daerah hendaklah menjadi lebih efisien dan efektif.

###### b. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah

Prinsip Otonomi Daerah yang dianut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pemberian kewenangan otonomi pada daerah kabupaten/kota yang didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab secara proposional. Artinya pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah.

Kebijakan otonomi daerah sangat memungkinkan daerah kabupaten/kota akan mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang demokratis, akuntabel, responbel, dan responsive manakala didukung oleh sumber daya manusia yang cakap, sumber daya keuangan dan peralatan yang

memadai. Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi melahirkan paradigma baru berupa pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tugas otonomi daerah dengan sebaik-baiknya, seperti yang diungkapkan oleh Kaho (1997) yaitu:

1) Manusia pelaksananya harus baik

Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dan baik akan berjalan lancar bila manusia pelaksananya baik. Dalam posisi ini, manusia sangat penting karena manusia merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang bertindak/bergerak sebagai penggerak roda organisasi pemerintahan.

2) Keuangan harus cukup dan baik

Penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan dalam bidang keuangan. Karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah.

3) Peralatan harus cukup dan baik

Pengertian peralatan disini adalah benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan Pemerintah Daerah.

4) Organisasi dan manajemennya harus cukup dan baik

Organisasi yang dimaksud adalah struktur susunan terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungan satu lainnya. Manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

**c. Tujuan Otonomi Daerah**

Tujuan otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya otonomi daerah yang diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu, secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan

kesatuan bangsa, mengurangi beban Pemerintah Pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Sedangkan tujuan otonomi daerah yang dikemukakan oleh Syarif Hidayat (dalam Halim, 2004, h.23) dibedakan dari dua sisi kepentingan yaitu kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dari kepentingan Pemerintah Pusat tujuan utamanya adalah pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Sedangkan bila dilihat dari kepentingan Pemerintah Daerah terdapat tiga tujuan yaitu :

- 1) Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equity*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik ditingkat lokal atau daerah.
- 2) Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
- 3) Untuk mewujudkan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi akan meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi.

## **2. Teori Pembangunan**

### **a. Perkembangan Paradigma Pembangunan**

Strategi-strategi pembangunan yang ada sampai dewasa ini dapat dikategorikan ke dalam dua paradigma pembangunan yaitu paradigma pembangunan yang berpusat pada produksi (*production centered development paradigm*) dan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development paradigm*). Paradigma pembangunan yang bertumpu pada produksi menitikberatkan perhatiannya pada pertumbuhan ekonomi dengan indikator meningkatnya pendapatan dan menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat (*welfare oriented development*), sedangkan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia menekankan peranan manusia bukan hanya sebagai sumber daya dan obyek pembangunan, yang menentukan tujuan yang hendak dicapainya sendiri, menguasai sumber daya yang diperlukan untuk mencapai

tujuan tersebut dan yang mengarahkan proses yang mempengaruhi dan menentukan hidupnya sendiri (Grant dalam Soekamto, 2002, h.15).

Tabel 1  
Perkembangan Paradigma Pembangunan

<b>Pertumbuhan (Modernisas)</b>	<b>Welfare State (Kesejahteraan)</b>	<b>Neo Ekonomi</b>	<b>Struktural</b>	<b>Humanizing</b>
Titik berat pada <i>trickle down</i> teori pertumbuhan	Titik berat pada <i>redistribution with growth</i>	Titik berat pada ekonomi yang mementingkan rakyat kecil	Titik berat pada kondisi keterbelakangan yang diakibatkan oleh struktur ekonomi	People center development

Sumber. Soeprapto, 2000

Era awal dari pembahasan mengenai teori pembangunan adalah dikemukakannya teori pertumbuhan. Pemikiran mengenai teori pertumbuhan ini berasal dari pandangan kaum ekonom ortodoks yang melihat pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diasumsikan akan meningkatkan standar kehidupan (Clark dalam Adi, 2003, h.2).

Pada umumnya kaum ekonom menganggap *Gross National Product* (GNP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Harapan penganut teori pertumbuhan ekonomi ini adalah bahwa pertumbuhan akan dapat dinikmati oleh masyarakat yang paling bawah dengan dampak tetesan ke bawah (*trickle down effect*) artinya masyarakat akan memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil sampingan pertumbuhan itu sendiri. Namun apabila dicermati, ukuran GNP dan PDB lebih banyak dinikmati oleh masyarakat yang tergolong kaya dan memperdaya kekuatan masyarakat miskin. Dengan demikian efek nilai dan GNP yang tinggi tidak mengenai masyarakat miskin, sehingga walaupun GNP tinggi masyarakat tetap tidak berdaya dan mereka tetap miskin.

Ketidakberhasilan dari paradigma tersebut memunculkan alternatif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dengan konsep pemerataan (*redistribution with growth*) dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang diukur melalui pemerataan pendapatan. Agar suatu strategi pembangunan mengandung unsur

pemerataan, maka ada tiga hal pokok yang harus diperhatikan, yaitu (1) upaya pembangunan harus terarah, keberpihakan ditujukan langsung kepada yang memerlukan dan program harus dirancang untuk mengatasi masalah yang sesuai dengan kebutuhannya; (2) program harus mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat atau kelompok sasaran. Mempunyai tujuan selain agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, juga sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya; (3) karena keterbatasannya masyarakat miskin sulit mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya secara sendiri-sendiri. Ditambah dengan lingkup bantuan akan menjadi luas kalau penanganannya dilakukan secara individu. Oleh karena itu pendekatan kelompok adalah yang paling efektif sehingga penggunaan sumber daya yang juga lebih efisien.

Paradigma kesejahteraan dianggap telah berhasil, namun karena keterbatasan ternyata masyarakat miskin sulit untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya, maka perlu adanya pengikutsertaan masyarakat dalam suatu pembangunan sehingga mereka mampu mengatasi masalahnya sesuai dengan kebutuhannya menggali potensi yang ada, sehingga memicu munculnya paradigma pembangunan yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat (*people centered development*) walaupun perkembangan paradigma *people centered development* diawali pada konsep ekonomi yang memperdayakan masyarakat miskin (*neo ekonomi*). Konsep *empowerment* sebagai suatu konsep alternatif pembangunan pada intinya memberikan tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi ke partisipasi, demokratisasi, dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung (Friedmann dalam Soekamto, 2002, h.23).

#### **b. Peran Rakyat dalam Pembangunan**

Rakyat merupakan target atau sasaran dalam proses pembangunan, kemakmuran atau kesejahteraan rakyat adalah tujuan pembangunan. Selain sebagai sasaran pembangunan, rakyat juga sebagai alat pembangunan. Rakyat adalah sumber daya manusia (*human resources*). Sumber daya manusia selain

sebagai tenaga fisik mereka juga tenaga ahli, sehingga dapat dikatakan rakyat mempunyai peran ganda dalam pembangunan, yaitu sebagai buruh dan modal.

Rakyat dianggap sebagai penduduk yang memberikan bantuan sumber daya yang perlu dimanfaatkan dan unsur negara yang perlu dilestarikan sebagai keuntungan dalam proses pembangunan. Sarana pembangunan harus dihubungkan satu dengan yang lainnya dan menciptakan produktifitas semaksimal mungkin. Pembangunan harus mampu menarik partisipasi rakyat. Tersedianya sumber daya alam yang cukup dan ilmu pengetahuan serta teknologi tidak akan dapat memanfaatkan sumber daya rakyat tanpa diubah terlebih dahulu taraf hidup mereka.

Dimensi manusia dalam pembangunan menjadi arti penting karena pembangunan membutuhkan daya dukung sumber daya manusia yang potensial baik kuantitas ataupun kualitasnya.

Adanya kelemahan dalam strategi pembangunan yang telah berjalan dari adanya arah pembangunan nasional Republik Indonesia (RI), dimana selama ini penyelenggara negara atau pemerintah hanya menguntungkan kuantitas pencapaian tujuan dalam pertumbuhan tanpa memperhatikan kualitas pencapaian pertumbuhan tersebut dimana sebenarnya masyarakat sangat perlu diajak bekerja sama dalam berbagai kegiatan program pembangunan.

Pemerintah dan masyarakat mempunyai kaitan yang sangat erat dalam proses pembangunan, jadi keterlibatan pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan sehingga pemerintah dan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri karena keduanya saling membutuhkan satu sama lain. Pemerintah tidak dapat bekerja tanpa keterlibatan masyarakat dan begitupun sebaliknya masyarakat tidak dapat membangun tanpa keterlibatan pemerintah.

Adapun bentuk dan jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut Kaho dalam Sarjudin adalah sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- 4) Partisipasi dalam evaluasi

Sedangkan menurut Keith Davis sebagaimana yang dikutip Sastro Poetro (2000), adalah:

- 1) *Psychological participation* (fisik)
- 2) *Physical participation* (tenaga)
- 3) *Psychological and physical participation* (pikiran dan tenaga)
- 4) *Participation with skill* (keahlian)
- 5) *Material participation* (barang)
- 6) *Money participation* (uang)

Strahm dalam Arsudi (2004, h.48) menilai bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap negara dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu pertama, mengatasnamakannya dengan pertumbuhan GNP, modernisasi alat-alat produksi serta penggunaan modal besar dan teknologi. Kedua, lebih mengutamakan pada pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan pokok, kemandirian dan pembagian kekuasaan yang operasional.

Strategi pembangunan dapat dikategorikan ke dalam dua paradigma pembangunan yaitu paradigma pembangunan yang berpusat pada produksi (titik berat pada pertumbuhan ekonomi) dan paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia (menekankan bahwa manusia bukan hanya sebagai obyek namun sebagai subyek dalam proses pembangunan). Pembangunan harus mampu untuk menarik partisipasi masyarakat dikarenakan pembangunan membutuhkan daya dukung sumber daya manusia yang potensial baik kuantitas maupun kualitasnya.

## **B. Kemiskinan**

### **1. Pengertian Kemiskinan**

Pengertian kemiskinan sangat beragam, yaitu mulai dari sekedar ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan hingga pengertian lebih luas yang memasukkan komponen-komponen sosial dan moral. Keragaman definisi tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan latar belakang ideologis masing-masing penganutnya.

Beberapa ahli yang mendefinisikan kemiskinan hanya dipandang dari segi ekonomi saja, antara lain: Suparlan yang mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat. Selain Suparlan, *World Bank* (1990) juga memandang kemiskinan dari segi ekonomi saja. Adapun definisi dari *World Bank* dalam Suryono (2004, h.100) adalah sebagai ketidakmampuan

seorang individu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005, h.749) kemiskinan adalah situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.

Menurut Ellis dalam Misbach (2004), untuk membangun pengertian kemiskinan dapat diidentifikasi kedalam beberapa dimensi, seperti dimensi ekonomi, sosial dan politik. Kemiskinan ekonomi dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan sosial dapat diartikan sebagai kekurangan jaringan sosial dan struktur sosial yang mendukung untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan agar produktifitas seseorang meningkat. Kemiskinan politik lebih menekankan pada derajat akses terhadap kekuasaan (*power*). Kekuasaan disini berarti mencakup tatanan sistem sosial (politik) yang dapat menentukan alokasi sumber daya untuk kepentingan sekelompok orang atau tatanan sistem sosial yang menentukan alokasi sumber daya.

Menurut Chambers dalam Suryono (2004, h.100), kemiskinan dianggapnya sebagai proses interaksi dari berbagai faktor yang muncul sebagai akibat dari situasi ketidakadilan, ketidakpasian, ketimpangan, ketergantungan dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu kemiskinan lebih dapat disebut sebagai perangkap kemiskinan yang saling terkait, yaitu:

- a. ketidakberdayaan (*powerlessness*)
- b. kerawanan atau kerentanan (*vulnerability*)
- c. kelemahan fisik (*physical weakness*)
- d. kemiskinan (*poverty*)
- e. isolasi (*isolation*)

Komponen ketidakberdayaan (*powerlessness*) mendorong berlanjutnya proses pemiskinan bagi masyarakat miskin dalam berbagai bentuk, antara lain orang yang tidak berdaya sering kali terlambat menerima bantuan dari pemerintah dan kecenderungan selalu dirugikan setiap terjadi transaksi jual beli. Faktor kerawanan atau kerentanan (*vulnerability*) ini berkaitan dengan kemiskinan karena orang terpaksa menjual atau menggadaikan kekayaan dengan kelemahan jasmani. Kelemahan fisik (*physical weakness*) mendorong seseorang menjadi miskin karena tingkat produktivitas rendah, tidak mampu menggarap lahan yang

luas, upah tenaga kerja rendah. Komponen kemiskinan (*poverty*) merupakan faktor yang paling menentukan dibandingkan dengan faktor-faktor yang lain. Kemiskinan menyebabkan kelemahan jasmani karena kurang makan yang pada gilirannya mengakibatkan kekurangan gizi sehingga timbul penyakit dan tidak dapat membiayai pengobatan. Isolasi (*isolation*) terjadi karena tempat tinggal mereka yang jauh, pelayanan bantuan pemerintah tidak bisa menjangkau, sebagian besar buta huruf sehingga mengakibatkan mereka jauh dari informasi.

Kedua ahli tersebut diatas mendefinisikan kemiskinan secara lebih luas jika dibanding dengan para ahli sebelumnya. Elis dan Chambers tidak hanya melihat kemiskinan dari sisi ekonomi semata, namun sudah mengarah kepada kehidupan sosial. Karena secara tidak langsung kemiskinan ekonomi akan berpengaruh terhadap kesehatan, moral, dan rasa harga diri dari masyarakat yang tergolong miskin.

## 2. Konsep Kemiskinan

Konsep kemiskinan merupakan suatu masalah dalam pembangunan dengan ditandai oleh indikator adanya pengangguran dan keterbelakangan yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan dan kecemburuan sosial. Hal ini disebabkan karena masyarakat miskin memiliki kelemahan dalam manajemen usaha dan keterbatasan dalam mengakses peluang kegiatan ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang merupakan kemampuan dan potensi yang lebih tinggi.

Sebenarnya sampai saat ini belum ada batasan masyarakat miskin secara baku yang dapat dijadikan acuan yang digunakan untuk mengetahui dan merumuskan konsep-konsep dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat miskin perkotaan utamanya yang tinggal di perkampungan kumuh.

Tumanggor dalam Misbach (2004), menyatakan bahwa “*masyarakat miskin adalah kelompok (sejumlah orang) yang memperoleh pendapatan sebagai imbalan terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan dimana jumlah penerimaan tersebut jauh lebih sedikit, bila dibandingkan dengan kebutuhan pokoknya*”.

Kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah ini mempunyai beberapa ciri:

- a. Pekerjaan yang menjadi mata pencaharian mereka pada umumnya merupakan pekerjaan yang menggunakan tenaga kasar.

- b. Nilai pendapatan mereka lebih rendah jika dibandingkan dengan jumlah jam kerja yang mereka gunakan.
- c. Nilai pendapatan yang mereka terima umumnya habis untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
- d. Karena kemampuan dana yang sangat kurang maka, untuk rekreasi, pengobatan, biaya perumahan, penambahan jumlah pakaian, semuanya itu hampir tidak dapat dipenuhi sama sekali.

Menurut Azhari dalam Misbach (2004), kemiskinan itu ada 3 macam, yaitu:

- a. Kemiskinan Alamiah, keadaan miskin yang dialami seseorang sejak dari asalnya. Kemiskinan ini timbul sebagai akibat sumber daya yang langka jumlahnya, atau karena tingkat perkembangan teknologi yang sangat rendah. Termasuk di dalamnya adalah kemiskinan akibat jumlah penduduk yang melaju dengan pesat di tengah-tengah sumber daya alam yang tepat.
- b. Kemiskinan Struktural, kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial sedemikian rupa, sehingga masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural ini terjadi karena kelembagaan yang ada membuat anggota atau kelompok masyarakat tidak menguasai sarana ekonomi dan fasilitas-fasilitas secara merata dengan kata lain kemiskinan ini tidak ada hubungannya dengan kelangkaan sumber daya alam.
- c. Kemiskinan Kultural, kemiskinan yang muncul karena tuntutan tradisi atau adat yang membebani ekonomi masyarakat, seperti upacara perkawinan, kematian atau pesta adat lainnya, termasuk juga sikap mentalitas penduduk yang lamban, malas, konsumtif serta kurang berorientasi ke masa depan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 1997), ukuran kemiskinan adalah dengan menetapkan batas kecukupan makan dan bataskecukupan non makan. Jadi dengan menggunakan data jumlah penduduk yang dirinci menurut pengeluaran per kapita sebulan, garis kemiskinan BPS ditetapkan, sehingga diperoleh jumlah dan persentase penduduk miskin. Penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran per kapita setara dengan kebutuhan makanan dan non makanan didefinisikan sebagai penduduk miskin. Batas kecukupan makanan dan non makanan penduduk di daerah perkotaan pada tahun 1995 ditetapkan sebesar Rp. 29.000,- per kapita per bulan.

Kebudayaan kemiskinan merupakan suatu adaptasi dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstatus kelas, sangat individualistik, dan berciri kapitalisme. Kebudayaan tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dari kesadaran bahwa mustahil dapat

meraih sukses dalam kehidupan. Kemungkinan terbesar yang memiliki kebudayaan kemiskinan berasal dari strata sosial yang lebih rendah, masyarakatnya sedang mengalami perubahan pesat dan memang sebagian dari mereka telah terasing dari masyarakat tersebut.

Menurut Suparlan (1984, h.33), ciri-ciri kebudayaan kemiskinan:

- a. Kurang efektifnya partisipasi dan integrasi kaum miskin ke dalam lembaga-lembaga utama masyarakat.
- b. Rendahnya tingkat organisasi di luar keluarga inti dan keluarga luas
- c. Masa kanak-kanak yang singkat dan kurang pengasuhan oleh orang tua
- d. Pada tingkat individu, kuatnya perasaan tak berharga, tak berdaya, ketergantungan, dan rendah diri.

Kemiskinan merupakan suatu pencerminan kegagalan dari suatu sistem pada masyarakat dan negara dalam mengelola sumber daya dan dana secara adil kepada warga negaranya. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Seseorang atau kelompok orang dapat dikatakan miskin absolut apabila tingkat pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Sedangkan kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan warga yang lain (di satu wilayah), dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya di tempat lain. Pada umumnya kemiskinan relatif ini lebih disebabkan karena ketimpangan distribusi pendapatan dengan ukuran pendapatan per kapita (Suryono, 2004, h.101).

Macam kemiskinan menurut Chambers dalam Achmadi (1994, h.162) antara lain:

- a. *The household is poor* (rumah tangga yang amat miskin).  
Sedikit memiliki aset. Rumah mereka amat kecil sering sekedar berupa gubuk tempat bernaung terbuat dari bambu atau rumbia. Rumah tangga jenis ini sering tidak mempunyai tanah, jika ada bukanlah milik sendiri.
- b. *The household is physically weak* (rumah tangga yang secara fisik amat lemah)  
Terdapat rasio ketergantungan yang sangat tinggi antar anggota rumah tangga yang tidak mampu bekerja dengan yang mampu bekerja.
- c. *The household is isolated* (rumah tangga yang terisolasi)  
Terisolasi dari dunia luar, dikarenakan letaknya yang jauh di pelosok dan pusat-pusat komunikasi atau pusat-pusat perdagangan. Terikat

oleh hubungan yang bersifat ketetangaan dengan aturan-aturan tertentu.

- d. *The household is vulnerable* (rumah yang ringkih)  
Sangat lemah dalam menghadapi situasi atau kebutuhan yang amat mendesak dan berubah-ubah.
- e. *The household is powerless* (rumah tangga yang tidak memiliki kekuatan)  
Rumah tangga ini mudah dilupakan oleh hukum, sehingga tanpa adanya perlindungan dari hukum.

### 3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Upaya penanggulangan kemiskinan telah lama menjadi perhatian dalam proses pembangunan. Sejak Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I), strategi penanggulangan kemiskinan dipusatkan pada peningkatan dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan beberapa kebijakan. Adapun beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan antara lain:

- a. Merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dengan dana bantuan dari pemerintah.
- b. Penyebaran sarana sosial, seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perbaikan lingkungan.
- c. Memperluas jangkauan sarana keuangan dengan mendirikan beberapa institusi kredit, seperti KCK dan KUD
- d. Pengembangan beberapa program pengembangan wilayah, seperti Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT).

Macam-macam strategi untuk penanggulangan kemiskinan, yaitu:

- a. Pertumbuhan melalui integrasi kedalam perekonomian pasar bebas
- b. Tatanan dunia baru perekonomian dunia
- c. Pembangunan mandiri / kemandirian selektif terhadap perekonomian

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kebijakan populasi penduduk dengan penekanan angka kelahiran, industrialisasi yang mendorong perubahan dari negara berpendapatan rendah menuju ke negara berpendapatan tinggi. Solusi lain agar si miskin dapat keluar dari perangkap kemiskinan adalah dengan menetapkan tujuan pembangunan yang harus berpihak pada penduduk yang berpenghasilan rendah dan alokasi barang atau jasa diprioritaskan pada penduduk miskin serta melalui pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan penduduk bukan miskin terhadap penduduk miskin.

Kemiskinan tidak hanya dapat dipandang dari segi ekonomi saja namun kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan politik. Adapun perangkat kemiskinan yang melingkari kehidupan masyarakat adalah adanya ketidakberdayaan, kerentanan, kelemahan fisik, kemiskinan dan isolasi. Umumnya partisipasi masyarakat miskin dalam kehidupan sosial masih tergolong rendah, karena adanya perasaan rendah diri dan tak berharga dari individu. Jika partisipasi rendah maka dapat dimungkinkan dalam memanfaatkan prasarana dan sarana yang ada di lingkungannya tidak maksimal.

## **C. Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi**

### **1. Pemberdayaan Masyarakat**

#### **a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Hikmat dalam Prasojo (2004), menggambarkan bahwa pemberdayaan pada dasarnya adalah memberikan kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.

Menurut Shardlow dalam Prasojo (2004), pemberdayaan menyangkut permasalahan bagaimana individu, kelompok ataupun masyarakat berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Sedangkan menurut Wijaya dalam Isfa (2002, h.103), pemberdayaan adalah upaya peodelegasian kebawah, artinya mengikutsertakan dalam menggali seluruh potensi yang ada untuk mencapai tujuan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat pada intinya ialah meningkatkan kemampuan masyarakat dan memandirikan masyarakat. Jadi masyarakat harus berusaha mengembangkan potensi yang dimilikinya agar bisa lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan.

PPK merupakan program lanjutan dari program IDT yang menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut menempatkan masyarakat sebagai subjek yang mandiri yang berperan serta dan terlibat secara langsung dalam kegiatan pembangunan.

Peran serta dan keterlibatan masyarakat tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program-program pembangunan. Dari situ nanti

dapat kita lihat bahwa masyarakat sebenarnya memiliki potensi yang bisa dikembangkan, dan melalui PPK inilah pengembangan SDM di kecamatan dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat dilihat sebagai program maupun proses. Sebagai program, pemberdayaan dilihat sebagai tahapan-tahapan kegiatan yang biasanya telah ditentukan jangka waktu pencapaiannya. Sedangkan sebagai proses, pemberdayaan merupakan sebuah proses yang berkesinambungan. Dalam pengertian pemberdayaan tidak berfungsi untuk meniadakan masalah, tetapi mempersiapkan struktur dan sistem dalam masyarakat agar proaktif dan responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan yang muncul dalam masyarakat.

#### **b. Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Setidaknya ada tiga konsep dalam pemberdayaan masyarakat menurut Isfa (2002, h.103), yaitu antara lain:

- 1) *Magical paradigm*, yaitu pemberdayaan sebagaimana aslinya. Pemberdayaan masyarakat diselaraskan dengan sistem ekonomi, sosial dan politik yang sudah digariskan. Realisasi dari konsep ini adalah merubah sikap mental masyarakat yang tidak berdaya kepada masyarakat yang memerlukan jaminan sosial.
- 2) *Critical paradigm*, yaitu pemberdayaan yang berkisar di akar. Dalam konsep ini adalah masyarakat dianggap tidak berdaya, hal ini disebabkan karena tatanan ekonomi, sosial politik dan sosial budaya tidak memberikan peluang atau ruang gerak bagi masyarakat lemah.
- 3) *Naïve paradigm*, yaitu pemberdayaan yang berkisar pada batang. Bahwa tatanan ekonomi, politik, sosial budaya secara umum sudah benar hanya saja praktiknya di lapangan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga diperlukan revisi atau reformasi kebijakan.

Ketiga konsep tersebut paling tidak dapat memberikan arah bagi terwujudnya pemberdayaan masyarakat, karena itu kerancuan dalam memahami konsep tersebut akan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan tatanan masyarakat itu sendiri.

#### **c. Permasalahan dalam Pemberdayaan Masyarakat**

Meskipun secara umum terdapat kesepakatan akan pentingnya pemberdayaan masyarakat, namun ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam proses implementasinya. Permasalahan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat adalah:

1) Diskontinuitas dan diskoordinasi

Keseluruhan program pemberdayaan masyarakat dilaksanakan tidak dikoordinasikan dengan baik dan dilaksanakan secara sporadis. Kebijakan pemerintah kadang berseberangan dengan pendampingan yang dilaksanakan LSM.

2) Disinformasi program

Pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan bantuan para konsultan terkadang tidak dipahami oleh masyarakat. Bahasa yang digunakan oleh para ilmuwan atau konsultan tersebut kadang tidak dapat dipahami oleh masyarakat atau lembaga pelaksana dari pemberdayaan masyarakat tersebut.

3) Disorientasi

Pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan proses biasanya memerlukan waktu yang lama.

4) Generalisasi

Adanya diferensiasi sosial, politik, dan budaya yang ada di Indonesia, maka pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah hendaknya tidak monolitik.

5) Rentang birokrasi dan tingginya biaya operasional

Berbagai peraturan hukum dan Undang-Undang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kaku, yang hanya didasarkan pada surat Keputusan (SK), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) juga sistem penganggaran juga dapat menghambat dalam pemberdayaan masyarakat.

6) Indikator yang tepat

Pemberdayaan masyarakat selama ini selalu ini diukur dalam bentuk fisik, komoditas dengan berorientasi pada input dan kualitatif daripada non fisik dengan ukuran keberhasilan dari dampak dan proses.

Menurut Wiliam dalam Prasojo (2004), pemberdayaan masyarakat menyangkut beberapa aspek antara lain aspek ekonomi, aspek politik, hukum, sosial budaya, maupun ekologi. Meskipun tujuan dari masing-masing pemberdayaan mungkin berbeda, namun untuk keberhasilan pemberdayaan yang

menyeluruh, berbagai macam bentuk pemberdayaan tersebut seharusnya dapat dipadukan dan saling melengkapi.

#### **d. Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat adalah melalui suatu proses belajar, sehingga mencapai status mandiri. Meskipun demikian, dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Adapun tahap-tahap dari pemberdayaan masyarakat seperti diungkap oleh Sulistiyani (2004, h.83), adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Tahap ini merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan masyarakat, dimana pihak pemberdayaan/aktor pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan pra kondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap ini transformasi pengetahuan dan kecakapan keterampilan dapat berlangsung baik, penuh semangat dan berjalan efektif jika tahap pertama telah terkondisi. Masyarakat akan menjalani proses belajar tentang pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai kecakapan keterampilan dasar yang mereka butuhkan. Pada tahap ini masyarakat hanya dapat memberikan partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau obyek pembangunan saja, belum mampu menjadi subyek dalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai dengan kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, melahirkan

kreasi-kreasi dan melakukan inovasi di dalam lingkungannya. Pada tahap ini masyarakat akan mandiri dalam melakukan pembangunan. Pemerintah hanya sebagai fasilitator saja.

Definisi pemberdayaan menurut para ahli sangat beragam, namun pada dasarnya pemberdayaan adalah proses memberdayakan masyarakat yang tidak berdaya sehingga memiliki kekuatan dan mampu untuk hidup mandiri. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat lepas begitu saja namun merupakan suatu proses yang berkesinambungan. Proses pemberdayaan tidak bisa lepas dari partisipasi dari masyarakat yang bersangkutan, karena pemberdayaan ini dimaksudkan agar turut aktif dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Manfaat yang dapat diambil dari pemberdayaan misalnya, antara lain:

- 1) Dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempengaruhi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan masalah kehidupan mereka
- 2) Meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat sebagai landasan bagi pendidikan demokrasi
- 3) Dengan adanya partisipasi masyarakat lokal dalam menangani urusan-urusan publik akan memperkuat solidaritas komunitas masyarakat lokal.

## **2. Partisipasi**

### **a. Pengertian Partisipasi**

Rumusan pengertian partisipasi sangat bervariasi, hal ini dikarenakan luasnya lingkup penggunaan konsep tersebut dalam wacana pembangunan. Mikkeisen dalam Soetomo (2006, h.438) menginventarisasi adanya enam tafsiran dan makna yang berbeda tentang partisipasi.

- 1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan
- 2) Partisipasi adalah usaha membuat masyarakat semakin peka dalam meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- 3) Partisipasi adalah proyek yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu
- 4) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar memperoleh informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak social.

- 5) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri
- 6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Berdasarkan beberapa pengertian partisipasi tersebut menunjukkan bahwa kriteria utama yang digunakan untuk menentukan adanya partisipasi masyarakat adalah adanya keterlibatan tanpa harus mempersoalkan faktor yang melatarbelakangi dan mendorong keterlibatan tersebut. Namun apabila latar belakang yang mendorong partisipasi, maka partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu proses pembangunan yang didorong oleh determinasi (hal-hal yang menentukan) dan kesadarannya tentang arti keterlibatan tersebut. Apabila yang muncul adalah unsur keterlibatan saja dan tidak didorong oleh determinasi dan kesadaran, maka tidak termasuk dalam kategori partisipasi melainkan lebih tepat disebut mobilisasi.

Pengertian partisipasi masyarakat yang sesuai dengan pembangunan adalah keseluruhan proses pembangunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program serta evaluasi dan menikmati hasil.

#### **b. Partisipasi dalam Pemberdayaan**

Partisipasi masyarakat dalam berbagai tindakan bersama melalui aktivitas lokal dapat menyebabkan terjadinya proses belajar sosial yang kemudian dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik dalam tindakan bersama dan aktivitas lokal selanjutnya. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan, di lain pihak dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil apabila dapat meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan yang juga merupakan pencerminan bahwa dalam pembangunan masyarakat lebih memfokuskan perhatian pada aspek manusia dan masyarakatnya bukan semata-mata pada hasil secara fisik materiil.

Faktor struktural dan kultural masyarakat perlu dipertimbangkan dalam mendorong munculnya partisipasi masyarakat terutama dalam proses pengambilan keputusan. Aspirasi, ide, pendapat, dan usulan dari masyarakat biasanya tidak muncul dalam forum yang juga dihadiri oleh pimpinan dan elit

lokal. Bukan dikarenakan masyarakat tidak mempunyai ide dan aspirasi, tetapi lebih dikarenakan suasana struktural cenderung mendorong mereka mengikuti dan menyetujui apa yang sudah disampaikan oleh elit dan pimpinannya. Oleh sebab itu dibutuhkan proses belajar sosial, dimana dalam proses ini pada tingkat masyarakat lokal agar bersedia mengurangi dominasinya dan dari masyarakat agar belajar untuk berani mengungkapkan aspirasinya meskipun berbeda dengan elitnya.

Secara normatif asumsi yang mendasari bahwa diperlukan adanya partisipasi masyarakat yaitu bahwa masyarakat lokal harus memperoleh proyek dan program pembangunan yang mereka tentukan sendiri. Asumsi normatif ini didasari oleh asumsi deduktif bahwa masyarakat lokal yang paling tahu apa yang menjadi masalah dan kebutuhannya dan mereka memiliki hak dan kemampuan untuk menyatakan pikiran dan kehendaknya tadi. Dengan demikian, apabila program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan di tingkat lokal didasari oleh keputusan yang diambil masyarakat sendiri maka program tersebut akan lebih relevan dan lebih menyentuh permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat.

Asumsi normatif dan asumsi deduktif tersebut kemudian dapat dilanjutkan dengan pengembangan asumsi teoritik yang menjelaskan hubungan sebab akibat. Beberapa asumsi teoritik yang dikembangkan Mikkelsen dalam Soetomo (2006, h.448) adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antar kelompok-kelompok masyarakat dapat diredam melalui pola demokrasi setempat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat setempat adalah mungkin.
- 2) Pembangunan menjadi positif apabila ada partisipasi dari masyarakat. Asumsi ini ingin menempatkan partisipasi masyarakat sebagai sarana sekaligus tujuan dari proses pembangunan.
- 3) Pemberdayaan masyarakat mutlak perlu mendapatkan partisipasinya, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan biaya untuk program pembangunan yang ditetapkan masyarakat, kecuali masyarakat itu sendiri yang mempunyai kemampuan untuk memaksa pemerintahnya.
- 4) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berarti ada penolakan secara internal di kalangan anggota masyarakat itu sendiri, dan secara eksternal terhadap pemerintah atau pelaksana program.

Kurangnya partisipasi masyarakat juga dapat disebabkan oleh adanya struktur sosial yang tidak memungkinkan masyarakat berpartisipasi. Hambatan struktural

yang sering termanifestasikan dalam bentuk konflik kepentingan perlu diatasi melalui musyawarah mufakat atau menghilangkan struktur sosial yang menghambat melalui reformasi struktural. Berbagai asumsi tersebut dapat dsigunakan sebagai landasan berfikir untuk mengembangkan strategi pembangunan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

#### **D. Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**

##### **1. Pengertian Program**

Suatu program meliputi serangkaian kegiatan yang relatif luas. Program menunjukkan: (1) langkah-langkah pokok yang diperlukan untuk mencapai tujuan, (2) satuan atau para anggota organisasi yang bertanggungjawab atas setiap langkah, dan (3) urutan dan waktu setiap langkah. Program dapat disertai suatu anggaran atau sekumpulan anggaran bagi kegiatan-kegiatan yang diperlukan (Handoko, 1984, h.88).

Menurut definisi yang dikemukakan oleh *United Nation* (1971) yang dikutip oleh Zauhar, kata "program" diartikan sebagai: "*prgram is taken to mean a form of organized social activity with a specific objective, limited in space and time. If often consist of an interrelated group of project an usually limited to one or mate on going organization and activities.*" (Zauhar, 1993, h.2).

Adapun langkah-langkah siklus atau program dan proyek Zauhar (Zauhar, 1993, h.19), meliputi:

##### **a. Perencanaan**

Kegiatan ini dimulai dengan konseptualisasi dan identifikasi. Hal ini dilakukan agar diperoleh informasi yang membantu untuk menetapkan bidang-bidang kegiatan program dan proyek yang akan dilakukan dan nantinya merupakan kegiatan yang logis dan penting. Hal tersebut menurut Zauhar dapat dilihat dari efisiensi penggunaan tenaga biaya dan waktu.

Pada tahap ini kemudian dilakukan studi kelayakan dalam tingkat membantu dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan pada saat yang tepat dapat dipergunakan untuk memulai program-program perbaikan. Kelayakan ini harus membuat informasi serta analisis yang berkaitan dengan:

1. Segi ekonomi dari seluruh proyek
2. Segi keuangan seluruh proyek terutama sumber pembiayaan

3. Segi teknis seluruh proyek, khususnya dalam pelaksanaan dan pengoprasian proyek
4. Dampak politik seluruh proyek yang sering merupakan pertimbangan yang dominan memproyeksikan seluruh kegiatan
5. Segi manajemen seluruh proyek dalam arti tersedianya tenaga pimpinan yang bertanggungjawab atas keseluruhan pengelolaan proyek
6. Desain sementara seluruh proyek (Zauhar, 1993, h.5)

Setelah selesai kemudian dilanjutkan dengan tahap desain dimana akan tergambar perincian yang lebih detail dan cermat yang meliputi daftar khusus catatan kegiatan, penjadwalan sumber daya, bidang kerja, usaha dan administrasi kepemimpinan/koordinator.

#### b. Implementasi Program

Pada implementasi diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait dengan program yang dimaksud dengan pelaku-pelaku yang ada di dalamnya dan tetuju. Faktor lain yang juga mempengaruhi adalah SDA, bahan perlengkapan, tata kerja, sangat mendukung keberhasilan jalannya suatu program.

#### c. Evaluasi dan Monitoring

Biasanya dilakukan melalui sistem pelaporan kemajuan (progress reporting), review dan evaluasi serta hasil monitor untuk keperluan kebijaksanaan pengambilan keputusan kembali (Re-implementasi). (Tjokromidjojo, 1990, h.204).

Dengan demikian hasil monitor dan evaluasi ini nantinya merupakan dasar untuk menilai keberhasilan program dan proyek serta sebagai bahan untuk mengadakan perubahan atau perluasan rencana kerja bila hal ini diperlukan.

## 2. Pengertian PPK

Di Indonesia banyak dikeluarkan program kebijakan seperti Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang merupakan salah satu jenis program untuk penanggulangan kemiskinan.

Program ini bersifat lintas sektoral dan saling mendukung dengan program lain, dimana dalam pelaksanaan melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan masyarakat serta memerlukan keserasian dan keterpaduan langkah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPK adalah integritas dan sinkronisasi dari program-program sebelumnya yakni antara kegiatan bantuan pembangunan sarana prasarana dengan kegiatan pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif

secara selaras dan berkesinambungan (saling mendukung dengan program-program lainnya) sehingga masyarakat semakin dapat diberdayakan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya.

Program Pengembangan Kecamatan adalah bagian upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PPK merupakan koreksi terhadap sistem pembangunan terdahulu yang pada umumnya dinilai bersifat sentralistik. PPK juga merupakan penyempurnaan terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan terdahulu seperti IDT dan P3DT. PPK diharapkan dapat menjadi suatu sistem pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumberdaya pembangunan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku dan komponen bangsa (Petunjuk Teknis Operasional PPK, 2005, h.1).

### **3. Azas Dan Prinsip Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang menganut azas dari, oleh dan untuk masyarakat, memiliki prinsip-prinsip PPK. Prinsip PPK adalah suatu nilai-nilai dasar yang selalu menjadi landasan atau acuan dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan yang akan diambil dalam pelaksanaan rangkaian kegiatan PPK. Nilai-nilai dasar tersebut diyakini mampu mendorong terwujudnya tujuan PPK. Prinsip PPK meliputi:

a. Keberpihakan kepada orang miskin

Pengertian prinsip keberpihakan kepada orang miskin adalah mendorong orang miskin untuk ikut berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian seluruh kegiatan PPK baik di desa maupun antar desa, termasuk menerima manfaat atau menikmati hasilnya.

b. Transparansi

Pengertian prinsip transparansi atau keterbukaan adalah masyarakat dan pelaku PPK yang berdomisili di kecamatan/desa lokasi PPK harus tahu, memahami dan mengerti adanya kegiatan PPK serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri.

c. Partisipasi

Pengertian prinsip partisipasi adalah masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan PPK, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan memberikan tenaga, pikiran, dana maupun barangnya.

d. Kompetisi sehat

Pengertian prinsip kompetisi sehat adalah memilih sesuatu yang menjadi prioritas dengan mempertimbangkan keberadaan sumberdaya yang tersedia. Setiap pengambilan keputusan di desa maupun antar desa dilakukan secara musyawarah berdasarkan pada prioritas kebutuhan nyata.

e. Desentralisasi

Pengertian prinsip desentralisasi adalah masyarakat memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang luas untuk mengelola PPK secara mandiri dan partisipatif tanpa intervensi negatif dari luar.

f. Akuntabilitas

Pengertian prinsip akuntabilitas bahwa setiap pengelolaan kegiatan PPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat maupun kepada semua pihak yang kompeten sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang telah disepakati.

g. Keberlanjutan

Pengertian prinsip berkelanjutan adalah bahwa dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem pelestariannya (Petunjuk Teknis Operasional PPK, 2005, h.1).

#### **4. Tujuan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**

Tujuan umum dari PPK adalah mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pemerintah lokal, serta penyediaan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi (Petunjuk Teknis Operasional PPK, 2005, h.1).

Pelaksanaan PPK seperti yang dinyatakan Tim Koordinasi PPK (Petunjuk Teknis Operasional PPK, 2005, h.1) tujuan khususnya meliputi:

- a. Meningkatkan peran serta masyarakat terutama kelompok miskin dan perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.

- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal.
- c. Mengembangkan kapaitas pemerintahan lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan.
- d. Menyediakan sarana prasarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin.

#### **5. Sasaran Kelompok Dan Lokasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**

Tim Koordinasi PPK menyebutkan lokasi dan kelompok sasaran PPK dalam Petunjuk Pelaksanaan PPK (2005, h.3) sebagai berikut :

##### a. Lokasi sasaran PPK:

1. Kecamatan-kecamatan yang pernah dan telah selesai mendapatkan bantuan dana PPK minimal 3 kali.
2. Kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk dalam kategori “kecamatan bermasalah”.
3. Kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh pemerintahan daerah dalam skema *cost sharing*.

##### b. Kelompok sasaran PPK:

1. Masyarakat miskin di pedesaan
2. Kelembagaan masyarakat di pedesaan
3. Kelembagaan pemerintahan lokal

#### **6. Pelaku Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**

Guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan PPK, maka dibentuk pelaku PPK yang melibatkan beberapa instansi baik di pusat maupun di daerah. Dalam Petunjuk Pelaksana PPK (2005, h.8) oleh Tim Koordinasi PPK disebutkan pelaku PPK itu terdiri dari :

##### a. Tingkat Kecamatan

Tim Koordinasi PPK di Kecamatan terdiri dari Camat sebagai Pembina pelaksanaan PPK oleh desa-desa di wilayah kecamatan, Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK), Penanggungjawab

Administrasi Kegiatan (PjAK), Tim Verifikasi (TV), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Fasilitator Kecamatan (FK), Pendamping Lokal.

b. Tingkat Desa

Tim Koordinasi PPK di tingkat Desa antara lain Kepala Desa sebagai pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan PPK di desa, Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), Fasilitator Desa (FD).

c. Pendanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

Alokasi bantuan langsung masyarakat (BLM) ditetapkan antara Rp. 500 juta sampai dengan Rp.1 milyar per kecamatan. Penetapan besarnya alokasi dana BLM berdasarkan jumlah penduduk dan lokasi.

**Tabel 2**  
**Pendanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**

Lokasi Kecamatan	Jumlah Penduduk / Kec	Alokasi Dana (Rp)
Jawa	>50.000 Jiwa	1 Milyar
	25.000 – 50.000 Jiwa	750 Juta
	<25.000 Jiwa	500 Juta
Luar Jawa	> 25.000 Jiwa	1 Milyar
	15.000 – 25.000 Jiwa	750 Juta
	< 15.000 Jiwa	500 juta

Sumber: Petunjuk Teknis Operasional PPK

1. Sumber dan Alokasi Dana PPK

Sumber dana PPK berasal dari :

- a. Swadaya masyarakat
- b. *Cost sharing* yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c. APBN yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan rupiah murni
- d. Partisipasi dunia usaha atau pihak lain yang tidak mengikat (Petunjuk Teknis Operasional PPK, 2005, h.3).

## 2. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran dana dimengerti sebagai proses penyaluran dana BLM dari KPPN dan/atau Kas daerah ke rekening kolektif BPPK yang dikelola oleh UPK. Mekanisme penyaluran dana BLM sebagai berikut:

- a. Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.
- b. Penyaluran dan *cost sharing* yang berasal dari pemerintah daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD dan diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan.
- c. Dana *cost sharing* yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal dari APBD yang bersumber dari pinjaman luar negeri.
- d. Besaran dana *cost sharing* dari APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh (*net*) tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya (Petunjuk Teknis Operasional PPK, 2005, h.3).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang diharapkan dari pelaksanaan PPK selain berupa tersedianya sarana dan prasarana fisik yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta adanya bantuan modal usaha ekonomi masyarakat yang lebih penting adalah terciptanya kemampuan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam hal ini berarti pelaksanaan PPK juga merupakan pembangunan masyarakat dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam semua prosesnya sehingga masyarakat kreatif dan mandiri serta tergali potensinya untuk meningkatkan taraf hidupnya sendiri. Jadi jelas upaya pembangunan masyarakat desa ini juga terkait erat dengan upaya pemberdayaan masyarakat, paradigma yang digunakan dalam pelaksanaan PPK.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif artinya bahwa peneliti ingin mengungkapakan tema yang diangkat secara mendalam. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Pendekatan kualitatif dilakukan dengan metode pencatatan atas pengamatan fakta yang berhasil dilihat. Bogdan & Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati” (Moleong, 2002, h.3).

##### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya. Ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan (Moleong, 2002, h.62). Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam Pelaksanaan PPK di Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri:
  - a. Tahap Perencanaan
  - b. Tahap Pelaksanaan
  - c. Tahap Pelestarian
2. Penanggulangan Kemiskinan di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri:
  - a. Pembangunan Sarana dan Prasarana

- b. Kegiatan Ekonomi Produktif
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan PPK
  - a. Faktor Pendukung
  - b. Faktor Penghambat

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat serta benar-benar diperlukan dalam penelitian. Peneliti juga diharapkan dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti, termasuk ciri-ciri lokasi, lingkungannya dan segala kegiatan yang ada di dalamnya.

PPK yang dilaksanakan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan sangat memerlukan peran serta masyarakat secara penuh dan mandiri. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini mengambil lokasi di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, sedangkan situs penelitiannya antara lain:

1. Kantor Kecamatan Mojo
2. Kantor Desa Mojo
3. Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
4. Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
5. Kantor Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD)

Alasan penetapan Kecamatan Mojo sebagai lokasi penelitian adalah:

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian yang dalam penelitian ini Kecamatan Mojo termasuk penerima bantuan PPK.
2. Adanya peran serta masyarakat Kecamatan Mojo dalam kegiatan PPK yang nilai baik guna mendukung keberhasilan pelaksanaan program ini, sehingga peneliti ingin memperoleh gambaran tentang pelaksanaan PPK dengan dukungan masyarakat di Kecamatan Mojo.

### **D. Sumber Data dan Jenis Data**

Menurut Lofland&Lofland dalam Moleong (2002, h.112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan yang diamati peneliti di lapangan, selanjutnya adalah data tambahan seperti data-data tertulis.

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah:

1. Kepala Desa
2. Ketua Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD)
3. Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD)
4. Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
5. Ketua Tim PPK
6. Kelompok penerima bantuan PPK

Sedangkan yang menjadi sumber data tambahan adalah dokumen-dokumen berupa buku-buku, laporan-laporan, artikel-artikel dan bulletin yang ada kaitannya dengan masalah penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber data yang utama tanpa adanya perantara. Dalam hal ini peneliti menetapkan sumber data primernya dari keterangan langsung Kepala Desa, Ketua UPK, dan kelompok penerima bantuan PPK.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang mendukung data primer yang berupa catatan-catatan resmi, dokumen, arsip-arsip, petunjuk pelaksanaan, peraturan-peraturan dan laporan yang ada di Kantor Bappeda Kabupaten Kediri dan Kecamatan Mojo serta bahan kepustakaan yang dapat mendukung data primer.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis menggunakan adalah:

1. Wawancara (interview)

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab yang dikerjakan dengan cara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam guna mempermudah penelitian selanjutnya.

2. Observasi

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi melalui alat indera dalam memahami dan memperhatikan obyek yang diteliti. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung, interaksi langsung dengan obyek maupun sumber data.

### 3. Dokumentasi

Yaitu penggalan data yang ditempuh dengan mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen yang sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Teknik ini berguna untuk melengkapi data-data yang peneliti dapatkan melalui teknik wawancara dan observasi.

### F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dipergunakan untuk menggali data dalam penelitian ini. Dengan mengingat bahwa penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan suatu program pembangunan, maka instrumen yang dipergunakan adalah:

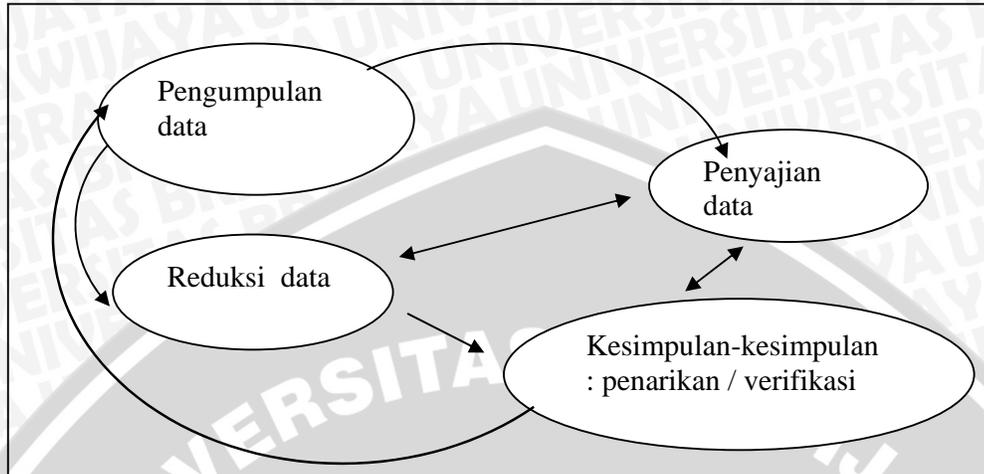
1. Peneliti sendiri yaitu dalam memperoleh data peneliti sebagai instrumen menyakinkan, mengamati serta mencatat peristiwa-peristiwa yang berlangsung dan berkaitan dengan subyektif.
2. *Field note*, berupa catatan lapangan yang dipergunakan untuk mencatat informasi utama selama penelitian.
3. Pedoman wawancara (*interview guide*) berupa daftar pertanyaan yang akan digunakan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara dengan informan.

### G. Analisa Data

Miles dan Huberman ( 1992:19 ) mengemukakan bahwa “ketiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis”.

Adapun tahapan yang akan dilalui dalam analisis data pada penelitian kualitatif, seperti yang dikemukakan Miler dan Huberman ( 1992:167 ) adalah sebagai berikut :

Gambar 1  
Bagan Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman, 1992, h.20

1. Reduksi Data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis saat penelitian.
2. Penyajian Data, yang diartikan sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi merupakan sebagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data akan diuji kebenarannya, kekokohnya, kecocokannya yaitu yang merupakan validitasnya.

Dalam metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan peneliti berusaha menggambarkan **”Pemberdayaan Masyarakat Dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan”**. (*Studi di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri*).

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Penyajian Data**

**1. Gambaran Umum**

**a. Gambaran Umum Desa Mojo**

Penelitian ini dilakukan di Desa Mojo yang merupakan salah satu dari desa yang terdapat di Kecamatan Mojo Kota Kediri. Secara lebih jelas, berikut disajikan secara rinci gambaran mengenai Desa Mojo.

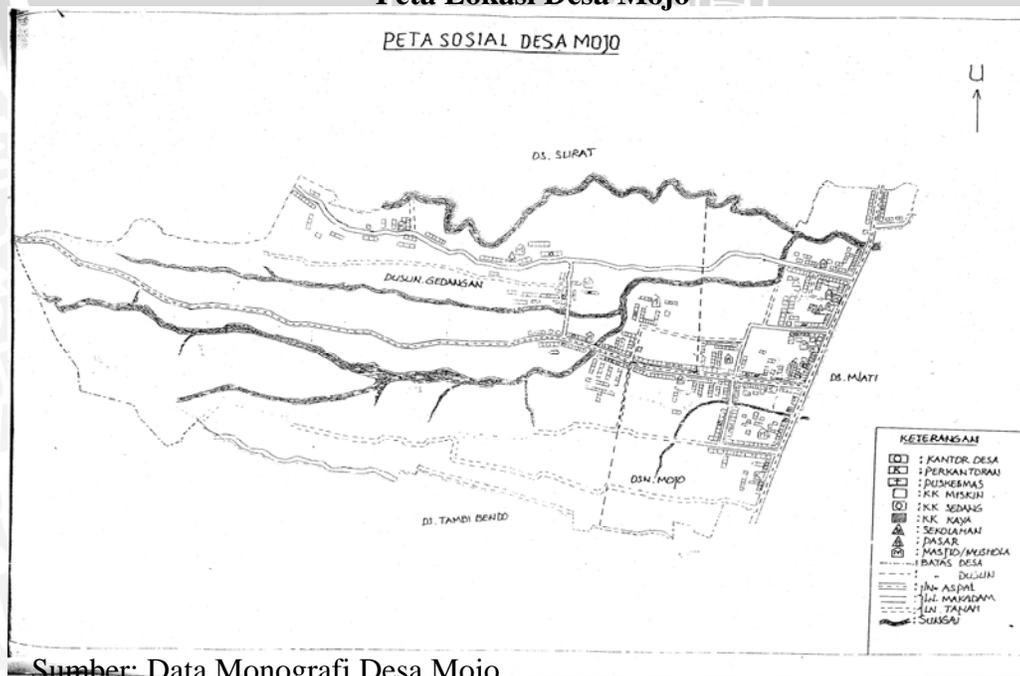
**1. Luas dan Batas Wilayah**

Secara geografis Desa Mojo merupakan daerah dataran rendah, dengan luas wilayah ± 377,197 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Surat dan Sukoanyar
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tambibendo
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mlati
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jugo

Jarak Desa Mojo dengan pusat pemerintahan Kecamatan Kediri berjarak ± 500 km, sementara jarak dengan ibukota kabupaten ± 15 km.

**Gambar 2**  
**Peta Lokasi Desa Mojo**



Sumber: Data Monografi Desa Mojo

## 2. Daftar Wilayah Administratif

Secara administratif, wilayah Desa Mojo terbagi menjadi 5 RW dan 15 RT. Desa ini juga terdapat 2 Dusun, yaitu Dusun Gedangan dan Dusun Mojo.

## 3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data monografi Desa Mojo, jumlah penduduk tahun 2005 berjumlah 2.691 jiwa sedangkan tahun 2006 semester awal berkisar 2.643 jiwa dengan 656 Kepala Keluarga. Secara rinci jumlah penduduk di Desa Mojo yang tersebar dalam dua dusun menurut jenis kelamin dan kriteria Kepala Keluarga dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Data Kependudukan Desa M ojo**

Dusun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Jenis Kelamin		
			L	P	Jmlh
1. Mojo	370	283	704	711	1415
2. Gedangan	286	254	598	630	1228
Jumlah	656	537	1302	1341	2643

Sumber: Data Monografi Desa Mojo

Potensi penduduk Desa Mojo untuk membangun secara lebih khusus dapat dilihat dari tabel kualitas angkatan kerja itu menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan di bawah ini :

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Menurut**  
**Tingkat Pendidikan Desa Mojo Keadaan Tahun 2006**

No.	Keterangan	Jumlah (Jiwa)
1.	Tidak / belum sekolah	96
2.	SD/ sederajat	1126
3.	SLTP	676
4.	SLTA	589
5.	Akademik	31
6.	Sarjana	16
Jumlah		2534

Sumber : Data Monografi Desa Mojo

Berdasarkan Tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Mojo yang memiliki pendidikan SLTA keatas masih sedikit sehingga nantinya masih diperlukan usaha yang cukup besar untuk memberdayakan penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah itu.

Selanjutnya keadaan penduduk Desa Mojo menurut mata pencaharian dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

**Tabel 5**  
**Jumlah Penduduk Menurut**  
**Mata Pencaharian Desa Mojo Keadaan Tahun 2006**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	Petani	132
2.	Buruh tani	257
3.	Buruh Swasta	110
4.	PNS	98
5.	Pedagang	12
6.	Pengrajin	37
7.	Peternak	1
8.	Bengkel	1
Jumlah		648

Sumber : Data Monografi Desa Mojo

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk dengan mata pencaharian sebagai buruh tani merupakan jumlah terbanyak dan kemudian disusul oleh penduduk dengan mata pencaharian sebagai petani. Karena itu potensi ini perlu mendapat pembinaan terutama dalam pelaksanaan pembangunan yang sedang dijalankan sekarang ini.

Dari keseluruhan uraian mengenai penduduk di Desa Mojo Kecamatan Mojo dapat memberikan gambaran tentang potensi keseluruhan yang dimiliki masyarakat desa tersebut terutama dalam mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga dapat berjalan dengan efektif.

#### **4. Kondisi Pemerintahan**

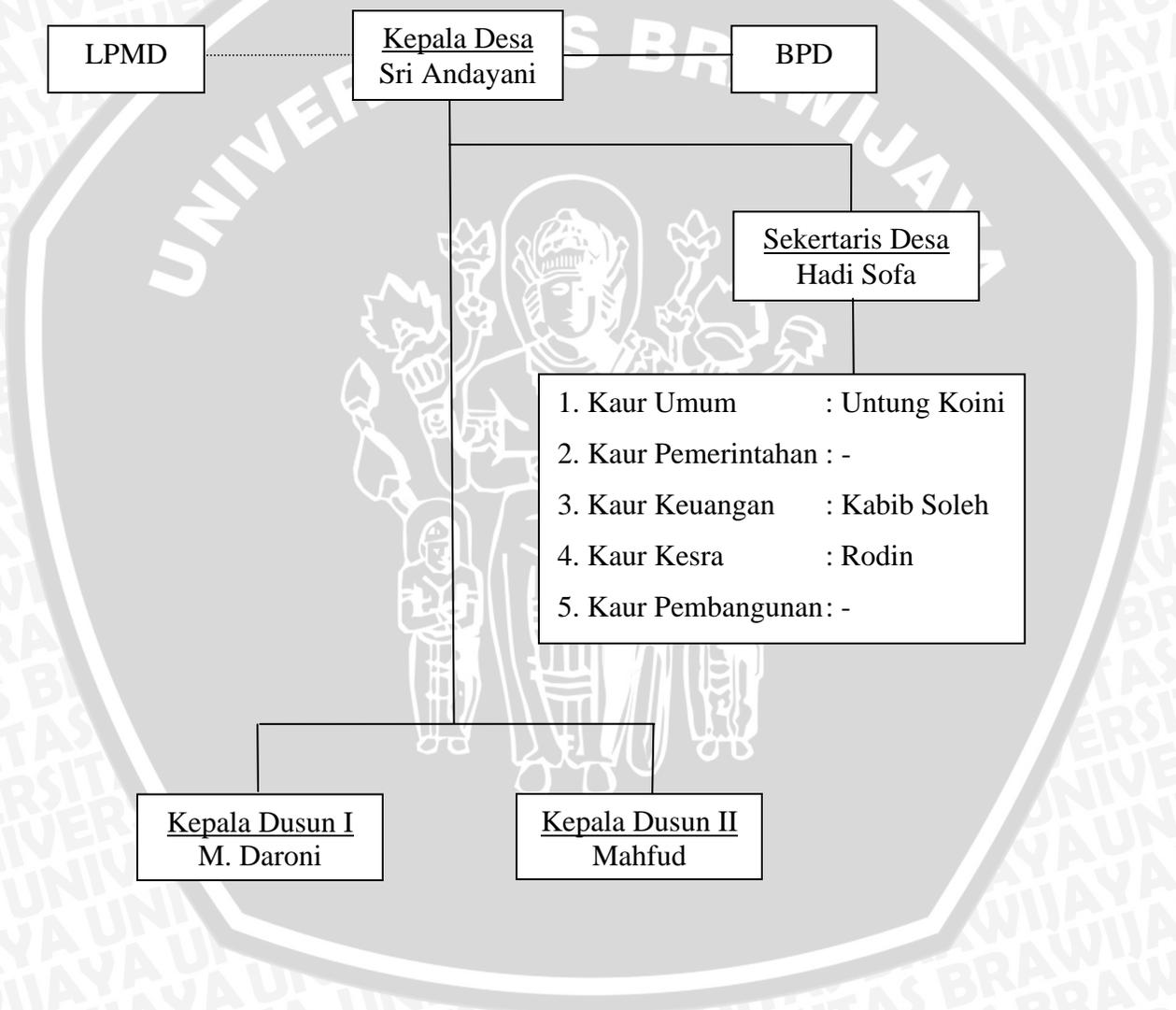
Pemerintahan desa adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat. Dalam pelaksanaan PPK di Desa Mojo, sangat diperlukan peran dari aparat kecamatan terutama pada awal pelaksanaan program ini yaitu untuk mensosialisasikan program ini kepada masyarakat.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum di desa, maka Kepala Desa dibantu oleh Sekertaris Desa serta perangkat desa lainnya berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

dalam rangka penyelenggaraan urusan termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban serta menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai studi utama pelaksanaan pemerintah desa.

Untuk lebih jelas mengenai susunan organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dapat dilihat pada Gambar 3 dibawah ini :

**Gambar 3**  
**Susunan Organisasi & Tata Kerja Perangkat**  
**Desa Mojo**



Untuk dapat menjalankan pembangunan desa dengan baik, maka perangkat desa harus juga memiliki kualitas yang baik. Untuk desa Mojo kualitas aparatnya dapat dilihat dari tingkat pendidikannya seperti pada Tabel 6 berikut ini :

**Tabel 6**  
**Tingkat Pendidikan Aparat Desa Mojo**

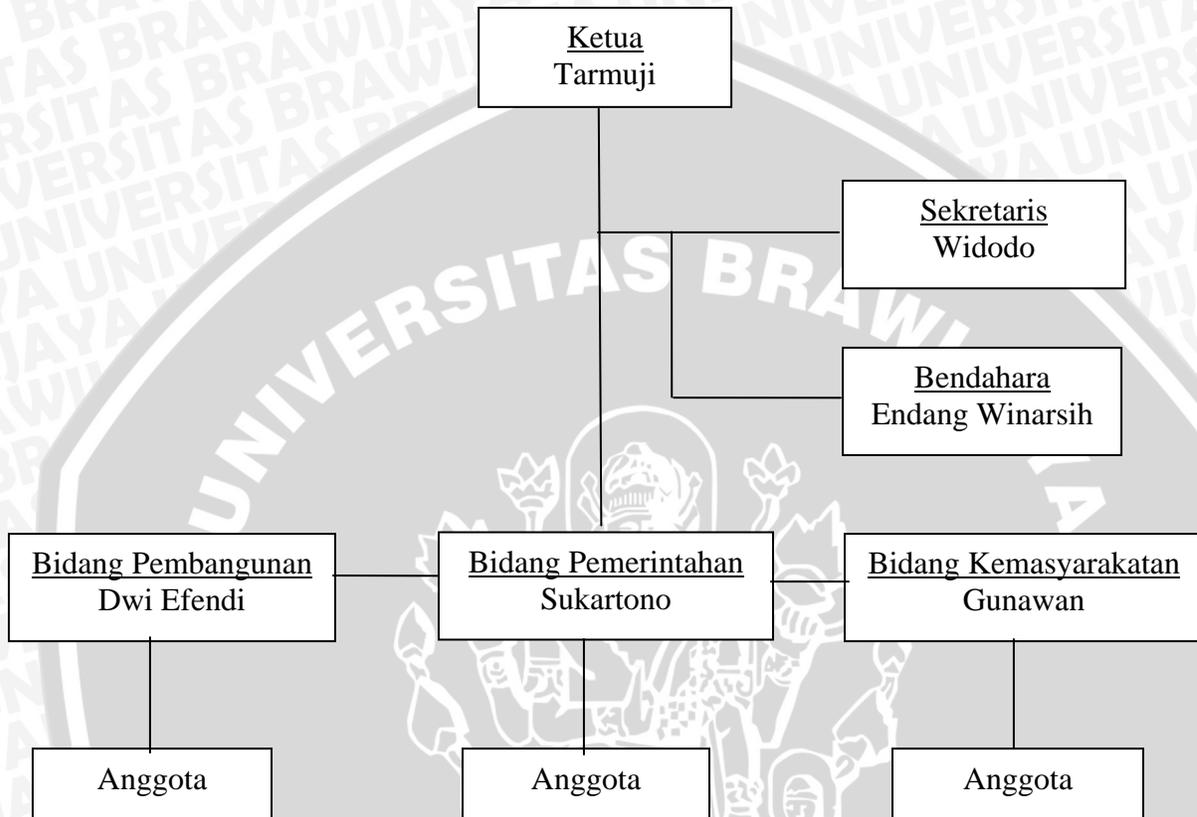
No.	Keterangan	Tingkat Pendidikan
1.	Kepala Desa	S1
2.	Sekertaris Desa	SLTA
3.	Kasun I	-
4.	Kasun II	-
5.	Kaur Umum	SLTP
6.	Kaur Pemerintahan	-
7.	Kaur Keuangan	SLTA
8.	Kaur Kesra	SLTP
9.	Kaur Pembangunan	-

Sumber: Kantor Desa Mojo Tahun 2006

Dilihat dari tingkat pendidikannya sudah lumayan cukup baik, sehingga dalam PPK ini perangkat desa dapat bekerjasama dengan masyarakat yang memegang peran utama dalam pelaksanaannya.

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau yang saat ini disebut Lembaga Pembangunan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan lembaga lain di desa yang disebut dalam pasal 202 UU No. 32 Tahun 2004. LPMD dalam pelaksanaan PPK ini mempunyai peran penting yaitu sebagai penyelenggara Musyawarah Desa untuk proses sosialisasi, mengurus administrasi dan melaporkan kemajuan kegiatan. Struktur LPMD Desa Mojo dapat dilihat pada bagan 1 dibawah ini:

**Bagan 4**  
**Susunan Organisasi & Tata Kerja LPMD**  
**Desa Mojo**

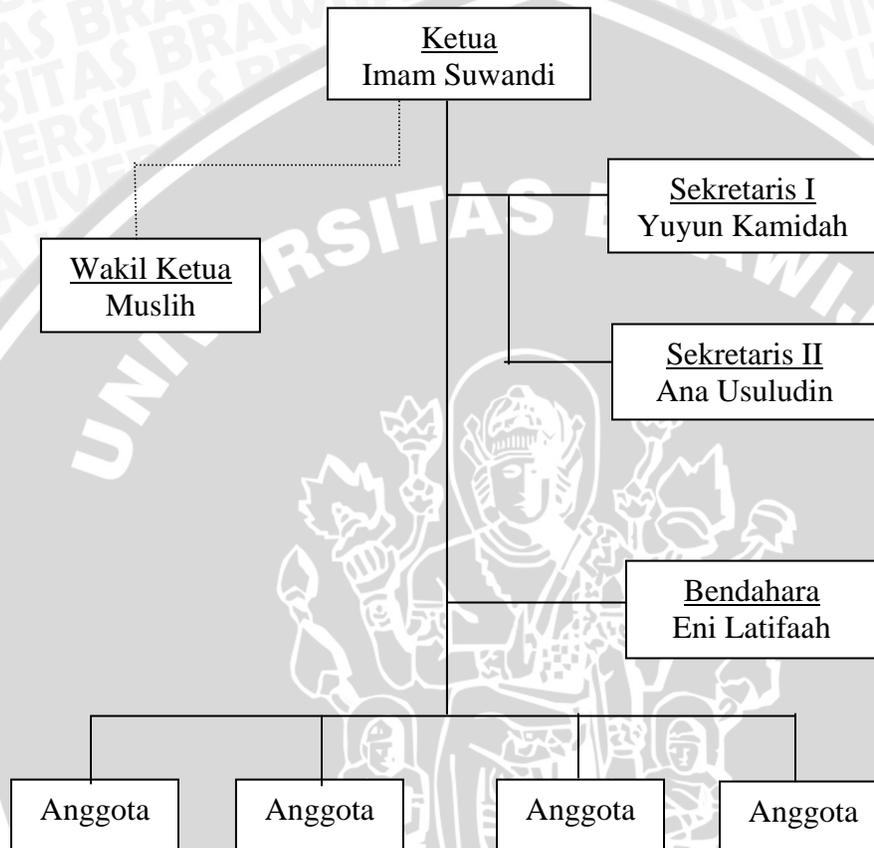


Sumber : Kantor Desa Mojo Tahun 2006

Selain itu juga terdapat lembaga lain di desa ini yaitu BPD yang memimpin dan anggotanya dipilih dari dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 34 yaitu, “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi membuat peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa”.

Untuk itu di desa Mojo BPD yang susunan organisasinya dapat dilihat pada bagan 5 di bawah ini, dalam PPK juga berfungsi sebagai wakil masyarakat serta mengawasi pelaksanaan program ini.

**Bagan 5**  
**Susunan Organisasi & Tata Kerja BPD**  
**Desa Mojo**



Sumber : Kantor Desa Mojo Tahun 2006

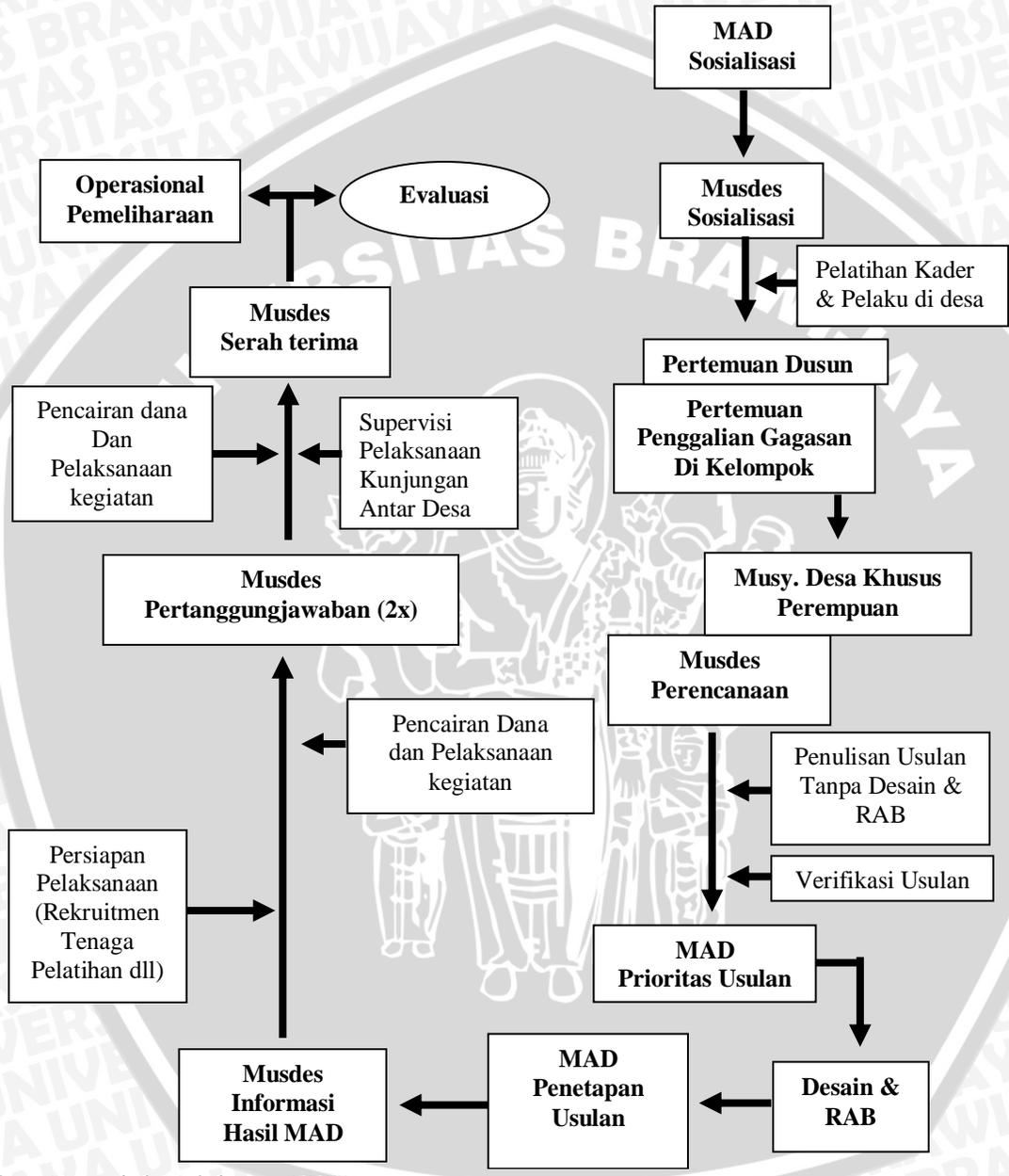
**b. Deskripsi Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**

Program Pengembangan Kecamatan (PPK) bersifat lintas sektoral dan saling mendukung dengan program lain, dimana dalam pelaksanaan melibatkan berbagai instansi pemerintahan dan masyarakat serta memerlukan keserasian dan keterpaduan langkah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PPK adalah integritas dan sinkronisasi dari program-program sebelumnya yakni antara kegiatan bantuan pembangunan sarana prasarana dengan kegiatan pemberian bantuan modal usaha ekonomi produktif secara selaras dan berkesinambungan (saling mendukung dengan program-program lainnya) sehingga masyarakat semakin dapat diberdayakan dalam upaya meningkatkan taraf kehidupannya.

Program pengembangan Kecamatan (PPK) adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan masyarakat pedesaan dengan menanggulangi masalah kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. PPK merupakan koreksi terhadap sistem pembangunan terdahulu yang pada umumnya dinilai bersifat sentralistik. PPK juga merupakan penyempurnaan terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan terdahulu seperti IDT dan P3DT. PPK diharapkan dapat menjadi suatu sistem pembangunan yang memungkinkan segala bentuk sumberdaya pembangunan dapat diakses secara merata dan adil oleh seluruh pelaku dan komponen bangsa.

Alur kegiatan PPK meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan. Sebelum memulai tahap perencanaan, hal penting yang harus dilakukan adalah melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada di desa dan kecamatan. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengenalan desa diantaranya adalah: (1) mengidentifikasi potensi dan sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan PPK di tingkat desa, termasuk pelaku-pelaku PPK tahap sebelumnya; (2) kondisi kegiatan atau bangunan yang telah dibiayai melalui PPK tahap sebelumnya; (3) inventarisasi dokumen rencana pembangunan desa (tahunan atau jangka menengah); (4) inventarisasi data kependudukan, program selain PPK yang akan masuk ke desa, dll. Dalam masa pengenalan kondisi desa sekaligus juga dilakukan sosialisasi PPK secara informal kepada masyarakat. Pada tahap ini harus dapat dimanfaatkan oleh seluruh pelaku PPK di semua tingkatan sebagai upaya untuk mendorong partisipasi dan pengawasan dari semua pihak, sehingga semua pelaku PPK memiliki pemahaman atau persepsi yang sama terhadap program. Pada dasarnya sosialisasi dapat dilakukan pada setiap saat atau kesempatan oleh pelaku-pelaku PPK.

**ALUR KEGIATAN PPK - III**



Sumber: Petunjuk Pelaksana PPK

Musyawarah Antar Desa (MAD) Sosialisasi merupakan forum pertemuan antar desa untuk sosialisasi tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PPK serta untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PPK. MAD Sosialisasi ini dilaksanakan di Kecamatan, selanjutnya

Musyawarah Desa Sosialisasi (MD I). MD I ini merupakan forum pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebarluasan informasi PPK di tingkat desa. Seperti dalam MAD I, MD I juga diharapkan tersosialisasinya informasi pokok PPK. Selain itu terbentuknya Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Monitoring, serta dipilih dan ditetapkannya Fasilitator Desa (Kader Desa). Pelaku-pelaku tingkat desa, seperti: Kader Desa dan TPK yang telah terpilih dalam musyawarah desa sosialisasi, selanjutnya akan memandu serangkaian tahapan kegiatan PPK yang diawali dengan proses penggalian gagasan di tingkat dusun dan kelompok masyarakat. Sebelum melakukan tugasnya, pelaku tingkat desa akan mendapatkan pelatihan terlebih dulu.

Tahap awal dari proses penggalian gagasan adalah mengadakan pertemuan di tingkat dusun untuk membuat peta sosial kemiskinan bersama-sama dengan warga dusun setempat. Tahap selanjutnya Musyawarah Desa Khusus Perempuan, musyawarah desa khusus perempuan dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan-gagasan dari kelompok-kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan yang merupakan aspirasi khusus dari kelompok perempuan. Usulan hasil musyawarah tersebut selanjutnya dilaporkan ke forum musyawarah desa penetapan usulan untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa.

Musyawarah Desa Perencanaan (MD II) atau disebut dengan musyawarah desa penetapan usulan, tahap selanjutnya setelah musyawarah khusus desa. Musyawarah desa penetapan usulan merupakan forum pertemuan masyarakat tingkat desa yang bertujuan untuk membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di tingkat kelompok dan tingkat dusun. Di dalam MD II terpilih dan ditetapkan Tim Penulis Usulan. Adapun tugas Tim Penulis Usulan yaitu menguraikan secara tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai usulan desa yang akan diajukan pada musyawarah antar desa. Hasil yang diharapkan dari proses penulisan usulan adalah dokumen proposal usulan kegiatan desa yang telah disetujui dalam musyawarah desa perencanaan dan musyawarah desa khusus perempuan, termasuk data dan isian formulir. Proposal kegiatan yang diajukan tidak harus disertai dengan detail desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Proses penulisan usulan lengkap dengan detail desain dan RAB atau tidak perlu menyertakan detail desain dan RAB, berdasarkan atas kemampuan dan pengalaman dari TPU yang ada. Jika desa dirasa belum mampu

untuk menyusun detail desain dan anggaran, maka proposal yang diajukan cukup disertai dengan desain awal, yaitu berupa gambaran dari usulan kegiatan secara global dengan perkiraan besaran pembiayaannya.

Tahap selanjutnya MAD Prioritas Usulan (MAD II) yang didalamnya menyusun dan menyepakati urutan atau peringkat usulan kegiatan dari tiap desa sesuai dengan skala prioritas yang telah disepakati serta ditetapkannya jadwal Musyawarah Antar Desa Penetapan Usulan dan waktu penyelesaian pembuatan desain dan RAB. Musyawarah Antar Desa (MAD III) Penetapan Usulan merupakan forum untuk mengambil keputusan terhadap usulan yang akan didanai melalui PPK. Musyawarah desa selanjutnya yaitu Musyawarah Desa Informasi Hasil MAD, musyawarah desa ini merupakan forum sosialisasi atau penyebaran hasil penetapan alokasi dana PPK yang diputuskan dalam musyawarah antar desa penetapan usulan. Untuk mewujudkan transparansi dalam proses pelaksanaan PPK, TPK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara bertahap kepada masyarakat. Proses ini disebut dengan Musyawarah Desa Pertanggungjawaban yang merupakan tahap setelah Musyawarah Informasi Hasil MAD. Tahap selanjutnya yaitu Musyawarah Desa Serah Terima, penjelasan kepada masyarakat bahwa setelah Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP3K) disahkan maka berakhir sudah tanggungjawab TPK terhadap kegiatan lapangan kemudian dilakukan evaluasi terhadap hasil pekerjaan, kinerja TPK dan penggunaan dana. Terakhir disepakati rencana pemeliharaan dan pelestarian oleh masyarakat terhadap kegiatan yang telah diserahterimakan.

## **2. Data Fokus**

### **a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Mojo**

#### **1. Tahap Perencanaan**

Sebelum dilaksanakan PPK, sebagai langkah awal dalam pelaksanaannya dimulai dengan proses persiapan. Dalam proses persiapan ini meliputi kegiatan memasyarakatkan atau mensosialisasikan PPK kepada penduduk yang tergolong miskin. Kegiatan sosialisasi ini sangat diperlukan disamping untuk pengenalan juga dalam rangka memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan tentang mekanisme pelaksanaan PPK yang akan diterima oleh masyarakat.

Dalam melaksanakan persiapan-persiapan pelaksanaan proyek atau kegiatan PPK dilakukan sesuai dengan hasil Musyawarah Desa (MD). Sebagaimana ketentuan dan tradisi di dalam kehidupan masyarakat Desa Mojo di dalam melakukan suatu kegiatan selalu di musyawarahkan atas kesadaran bahwa kehidupan dan ikatan kekeluargaan serta semangat gotong royong yang sangat tinggi.

Setelah masyarakat memahami keberadaan PPK sebagai pedoman untuk penanggulangan kemiskinan masyarakat. Dengan demikian sosialisasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai konsepsi dasar, tujuan, sasaran, prinsip-prinsip serta proses pendanaan dan mekanisme pelaksanaan PPK melalui berbagai forum ditingkat pusat maupun daerah. Seperti yang diungkapkan Ketua TPK di tingkat Desa Mojo Bapak Sugito tanggal 18 Juni 2007 bahwa “Proses sosialisasi PPK di Desa Mojo dari Musyawarah Desa I (MD I) yang membahas tentang proses sosialisasi kepada kelompok masyarakat dan kelompok perempuan.

Hal yang sama diungkapkan oleh Bu Sri Andayani, yang mengatakan: “Sosialisasi di tingkat desa ini melibatkan langsung para perangkat desa dan anggota masyarakat dalam forum MD I untuk mempublikasikan tentang informasi PPK kepada masyarakat dan dipilihnya para pelaku PPK di tingkat desa.” (Wawancara dengan Kepala Desa Mojo tanggal 18 Juni 2007).

Ini berarti Desa Mojo yang juga termasuk salah satu desa di Kecamatan Mojo mendapatkan kesempatan untuk memperoleh dana PPK melalui prosedur yang telah ditentukan dan tidak mempunyai masalah tanggungan dan pajak dari pemerintah daerah dan yang terpenting adalah desa tersebut termasuk dalam golongan desa miskin yang ada didesa tersebut.

Jumlah Kepala Keluarga miskin di Desa Mojo pada awal pelaksanaan PPK dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7**  
**Data Kependudukan Desa Mojo Tahun 2006**

Dusun	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	Jenis Kelamin		
			L	P	Jmlh
1. Mojo	370	283	704	711	1415
2. Gedangan	286	254	598	630	1228
Jumlah	656	537	1302	1341	2643

Sumber : Data Monografi Desa Mojo

Berdasarkan keterangan diatas Desa Mojo berhak mendapatkan dana PPK karena masih merupakan desa tertinggal yang kepala keluarga miskinnya yang cukup banyak.

Dalam MD I di Desa Mojo juga telah disosialisasikan seluruh informasi tentang PPK dengan melibatkan tokoh antara lain : Kepala Desa, LPMD, BPD, Tokoh Masyarakat, Perempuan, Ketua RT/RW dan mengikutsertakan orang miskin. Selain itu juga dalam MD I menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) desa serta fasilitator desa yaitu : 1). Ketua : Sugito, 2). Sekretaris : Junaidi, 3). Bendahara : Baitty Zubaidah, 4). Kader Teknis : M. Daroini, 5). FD Perempuan : Idayatul Idayah, 6). FD Laki-laki : Asrofi.

Setelah dilakukan MD I langkah selanjutnya adalah penggalian gagasan yang dilakukan kepada kelompok-kelompok masyarakat dan dusun yang ada di Desa Mojo setelah mereka mendapatkan penjelasan atau sosialisasi tentang PPK. Untuk efisiensi maka kegiatan penggalian gagasan dengan memanfaatkan pertemuan rutin yang sudah ada (formal ataupun informal) baik yang diselenggarakan oleh dusun maupun kelompok masyarakat.

Seperti yang dikatakan oleh Pak Tarmuji, yang mengatakan: “Dalam pertemuan kelompok dan dusun tersebut setelah mendapatkan sosialisasi tentang PPK kemudian anggota kelompok atau dusun membahas apa yang menjadi gagasan kegiatan kelompok atau dusun untuk memenuhi kebutuhannya.” (Wawancara dengan Ketua LPMD tanggal 18 Juni 2007).

Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua LPMD, Fasilitator Desa, Ketua RT/RW dan tokoh masyarakat. Dikatakan pula oleh Ibu Idayatul Idayah, “Proses sosialisasi dan penggalian gagasan PPK Desa Mojo juga dilaksanakan oleh kelompok perempuan guna menetapkan usulan perempuan.” (Wawancara dengan FD perempuan tanggal 19 Juni 2007).

Gagasan-gagasan dari kelompok dan dusun selanjutnya dimasukkan dalam sebuah daftar gagasan dan dipisahkan antara gagasan dari kelompok perempuan dengan gagasan dari kelompok laki-laki. Gagasan dari kelompok perempuan selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa Khusus Perempuan di tingkat desa. Berikut contoh tabel gagasan untuk musyawarah khusus perempuan.

Tabel 8

Tabel Gagasan Untuk Musyawarah Khusus Perempuan

Gagasan Kegiatan	KRITERIA				Amplop untuk biji-bijian	Rangking Gagasan
	Bisa dikerjakan masyarakat	Lebih bermanfaat untuk kelompok miskin	Bermanfaat untuk perempuan	Didukung oleh sumber daya		

Sumber: Petunjuk Pelaksana PPK Tahun 2006

Musyawarah Desa Khusus Perempuan dihadiri oleh kaum perempuan dan dilakukan dalam rangka membahas gagasan dari kelompok perempuan dan menetapkan usulan kegiatan simpan pinjam yang merupakan aspirasi khusus dari kelompok perempuan sebagai bagian usulan desa. Usulan hasil Musyawarah Desa II untuk disahkan sebagai bagian dari usulan desa ke Musyawarah Antar Desa II (MAD II).

Hasil yang dicapai dalam Musyawarah Desa II yang diadakan pada tanggal 3 Juli 2006 di SLTP Negeri 1 Mojo bertujuan untuk membahas seluruh usulan kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di tingkat kelompok dan tingkat dusun.

Adapun hasil yang dicapai dalam MD II tersebut antara lain :

a. Usulan kegiatan

Adapun usulan kegiatan yang diajukan antara lain berupa pembangunan sarana prasarana fisik, sarana pendidikan dan kegiatan ekonomi produktif berupa usaha simpan pinjam. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ketua TPK Bapak Sugito, yang mengatakan: “Musyawarah di tingkat dusun menghasilkan 3 usulan berupa kegiatan fisik pembangunan irigasi, sarana pendidikan gedung TK dan usaha ekonomi produktif/simpan pinjam.” (Wawancara dengan Ketua TPK Desa Mojo tanggal 20 Juni 2007).

Kegiatan yang diusulkan antara lain pembangunan irigasi, pembangunan gedung TK dan simpan pinjam. Dari ketiga usulan tersebut ternyata yang layak didanai dan mendapat rangking tertinggi adalah irigasi dan usaha ekonomi produktif/simpan pinjam.

b. Memilih dan menetapkan Tim Penulis Usulan.

Dalam MD II ditetapkan pula Tim Penulis Usulan yaitu : a). Moch. Daroini, b). Darmani, c). Wiwik. Tim Penulis Usulan bertugas menguraikan secara tertulis gagasan

kegiatan masyarakat yang sudah dimusyawarahkan pada MD II dan musyawarah khusus perempuan serta disetujui menjadi usulan desa untuk diajukan pada musyawarah Antar Desa II. Seperti yang dikemukakan oleh Pak Tarmuji, mengatakan: “Usulan yang telah disusun oleh Tim Penulis Usulan kemudian dikonfirmasi kepada kelompok masyarakat yang bersangkutan selanjutnya diajukan ke kecamatan untuk diverifikasi.” (Wawancara dengan Ketua LMPD tanggal 22 Juni 2007).

Dikatakan pula oleh Bapak Sugito, yang mengatakan: “Kegiatan verifikasi ini sangat penting dan bertujuan untuk memeriksa kelayakan usulan kegiatan untuk didanai dan dilaksanakan oleh PPK.” (Wawancara dengan Ketua TPK Desa Mojo tanggal 22 Juni 2007).

Dari hasil wawancara diatas kemudian usulan yang telah diverifikasikan dibahas dan ditetapkan pada Musyawarah Antar Desa II.

Dalam Musyawarah Antar Desa II usulan kegiatan yang masuk di kecamatan hanya tersaring 15 usulan yang disetujui oleh Tim Verifikasi. Dari 15 usulan yang didanai oleh Bantuan PPK sebagian besar berbentuk bantuan murni, dengan kata lain desa menerima bantuan tidak perlu mengembalikan sepeserpun uang dari dana yang dipinjam, yang akan digunakan untuk pembangunan infrastuktur dan pinjaman ekonomi. Dalam pinjaman ekonomi dikenakan bunga pinjaman bagi penerima manfaat bantuan PPK.

Desa yang mendapatkan dana bantuan PPK yang hanya berbentuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) sebanyak 4 Desa, sedangkan 11 Desa lainnya berbentuk UEP dan sarana prasarana. Penerima dan PPK terbesar adalah Desa Ngetrep yaitu sebesar Rp 176.822.050,- dari jumlah seluruh dana yang dicairkan di Kecamatan Mojo. Berikut ini daftar usulan kegiatan desa yang menerima dana bantuan PPK Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri tahun anggaran 2006/2007 dibawah ini :

**Tabel 9**  
**Daftar Usulan Kegiatan Desa Yang Menerima Dana Bantuan PPK**  
**Tahun Anggaran 2006**

No.	Nama Desa	Kegiatan		Pembiayaan (Rp)	
		Jenis	Nama	PPK	Swadaya
1.	Jugo	Simpan Pinjam	SPP	8.947.300	425.000
2.	Keniten	Simpan Pinjam	SPP	11.052.600	525.000
		Sarana Prasarana	Pendidikan	39.056.750	2.973.200
			Perpipaan	33.488.250	5.286.950
3.	Kranding	Simpan Pinjam	SPP	7.894.650	375.000
		Sarana Prasarana	Makadam	27.512.600	3.226.750
4.	Kraton	Simpan Pinjam	SPP	13.624.150	650.000
		Sarana Prasarana	Irigasi	86.641.000	5.872.750
			Pendidikan Mebeler & Alat Bermain	21.507.150	2.000.000
5.	Mlati	Simpan Pinjam	SPP	3.157.850	150.000
6.	Mojo	<b>Simpan Pinjam</b>	<b>SPP</b>	<b>5.263.100</b>	<b>250.000</b>
		<b>Sarana Prasarana</b>	<b>Irigasi</b>	<b>92.848.650</b>	<b>5.162.100</b>
7.	Mondo	Simpan Pinjam	SPP	15.789.400	750.000
		Sarana Prasarana	Pendidikan 1. Mebeler	102.111.350	7.995.200

			2. Rehab 3. Alat Bermain		
8.	Ngadi	Simpan Pinjam	SPP	17.368.400	825.000
9.	Ngetrep	Simpan Pinjam	SPP	3.157.850	150.000
		Sarana Prasarana	Pendidikan 1. Gedung Baru 2. Rehab Gedung 3. Mebeler Alat Bermain	95.440.950	9.155.250
			Makadam 1. Makadam 2. Gorong-gorong 3. Plengsengan	78.223.250	8.911.250
10.	Petok	Simpan Pinjam	SPP	14.736.800	700.000
		Sarana Prasarana	Makadam	17.331.350	4.428.850
11.	Ploso	Simpan Pinjam	SPP	21.368.400	1.015.000
		Sarana Prasarana	Makadam 1. Makadam 2. Plat Beton	25.771.400	2.722.100
12.	Petungroto	Simpan Pinjam	SPP	8.842.050	420.000
		Sarana Prasarana	Pendidikan 1. Tambah Ruang 2. Mebeler 3. Alat Bermain	36.054.200	3.344.250
			Jembatan 1. Jembatan Beton 2. Abutment Sayap Plengsengan	58.698.950	8.569.250
13.	Sukoanyar	Simpan Pinjam	SPP	7.368.400	350.000
		Sarana Prasarana	Pendidikan 1. Mebeler & Alat Bermain	25.131.400	2.700.000
			Makadam 1. Makadam	38.468.600	3.919.650
14.	Surat	Simpan Pinjam	SPP	10.000.000	475.000
15.	Tambi Bendo	Simpan Pinjam	SPP	4.473.650	212.500
		Sarana	Makadam	68.609.550	4.568.450

	Prasarana	1. Makadam 2. Gorong-gorong 3. Rehab Jembatan		
--	-----------	---	--	--

Sumber : Laporan UPK Tahun 2006

Dalam MAD II yang dilakukan oleh forum ditingkat kecamatan bertujuan membahas, memilih dan menetapkan peringkat kegiatan dari masing-masing desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Pak Sugito selaku Ketua TPK Desa Mojo, yang mengatakan: “Dari hasil usulan kegiatan yang berasal dari desa kemudian diserahkan kepada Fasilitator Kecamatan guna dikompertisikan.” (Wawancara dengan Ketua TPK Desa Mojo tanggal 3 Juli 2007).

Bu Sri Andayani juga menambahkan, yang mengatakan: “Sesuai dengan hasil MAD II kemudian ditetapkan MAD III .” (Wawancara dengan Kepala Desa tanggal 3 Juni 2007).

Selanjutnya dalam MAD II juga ditetapkan jadwal MAD III serta menetapkan alokasi dana kegiatan berdasarkan peringkat usulan kegiatan yang disetujui dalam MAD II, desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatannya.

Musyawarah Desa III (MAD III) Desa Mojo dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2006 di Pendopo Kecamatan Mojo yang merupakan forum untuk mensosialisasikan kembali hasil penetapan alokasi dana PPK yang diputuskan dalam MAD III. Bagi desa yang mendapatkan dana PPK dalam MAD III diharapkan disepakati jadwal pelaksanaan tiap kegiatan yang akan dilaksanakan, realisasi sumbangan dari masyarakat, serta ditetapkannya susunan lengkap Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan jenis kegiatan yang didanai.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Dari hasil MAD III yang telah disetujui dalam pelaksanaan kegiatan PPK Desa Mojo ada dua yaitu pembangunan irigasi dan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan. Sebelum dilaksanakannya kegiatan tersebut terlebih dahulu diawali dengan proses pencairan dana kemudian diserahkan kepada anggota TPK. (Berdasarkan berita acara musyawarah pertanggungjawaban PPK Desa Mojo tahun 2006). Dikatakan oleh Pak Sugito, yang mengatakan: “Jumlah dana PPK yang diterima Desa Mojo sebesar Rp 98.111.750,-. Pencairan dana PPK untuk Desa Mojo dilakukan dalam tiga tahap pencairan.” (Wawancara dengan Ketua TPK Desa Mojo tanggal 3 Juli 2007).

Untuk proses pencairan dana PPK dapat dilihat dalam table 9 dibawah ini:

**Tabel 10**  
**Proses Pencairan Dana PPK Desa Mojo**  
**Tahun Anggaran 2006/2007**

No.	Proses Pencairan	Jumlah (%)
1.	Tahap I	40%
2.	Tahap II	40%
3.	Tahap III	20%

Sumber: Laporan UPK Tahun 2006

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa proses pencairan dana PPK dibagi dalam tiga tahap yaitu: 1). Tahap I sebesar 40%, 2). Tahap II sebesar 40%, 3). Tahap III sebesar 20%. Ketiga tahapan ini merupakan mekanisme proses pencairan dana PPK dari pusat.

Jumlah keseluruhan dana PPK untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana maupun kegiatan simpan pinjam sebesar Rp 98.111.750,- yang dapat dilihat dalam tabel 5 tentang Rekapitulasi Anggaran Biaya PPK Desa Mojo dibawah ini:

**Tabel 11**  
**Rekapitulasi Anggaran Biaya PPK Desa Mojo**  
**Tahun Anggaran 2006/2007**

No.	Kegiatan	Sumber Anggaran Biaya (Rp)		Jumlah (Rp)
		PPK	Swadaya	
1.	Keg. Sarana & Prasarana: Pembangunan Irigasi	92.848.650	5.162.100	98.010.750
2.	Keg. Ekonomi Produktif: Simpan Pinjam	5.263.100	250.000	5.513.100
	Jumlah	98.111.750	5.412.100	103.523.850

Sumber: Laporan UPK Tahun 2006

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa yang diusulkan dalam MD III Desa Mojo tahun anggaran 2006/2007 terdiri dari dua jenis proyek atau kegiatan. Pertama, kegiatan sarana prasarana yaitu pembangunan irigasi biaya yang dialokasikan untuk pembangunan irigasi ini sebesar Rp 98.010.750,- dengan rincian Rp 92.848.650,- dari bantuan PPK dan

sebesar Rp. 5.162.100,- dari swadaya masyarakat setempat. Sedangkan untuk kegiatan ekonomi produktif dalam bentuk simpan pinjam sebesar Rp 5.513.100,- dengan rincian Rp 5.263.100,- dari dana PPK dan Rp 250.000,- dari swadaya anggotanya.

### 3. Tahap Pelestarian

Ada dua kegiatan sebelum tahap pelestarian yaitu kegiatan pemantauan dan kegiatan pelaporan. Yang pertama tahap pemantauan, Tahap Pemantauan merupakan proses yang terus menerus dilakukan sepanjang tahapan PPK dimulai dari persiapan, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Hasil pemantauan ini menjadi input untuk evaluasi pelaksanaan program maupun dasar pembinaan atau dukungan teknis pelaku PPK dan masyarakat.

Tujuan pemantauan seperti yang diungkapkan oleh Pak Sugito, yang mengatakan: “Tujuan dari pemantauan untuk memastikan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip dan prosedur PPK, selain itu pemantauan juga untuk melihat kinerja semua pelaku PPK”. (Wawancara dengan Ketua TPK tanggal 4 Juli 2007).

Adapun jenis kegiatan pemantauan PPK di Desa Mojo dilakukan dengan 2 langkah yaitu: **Pertama, Pemantauan Internal.** Pemantauan internal dilakukan oleh pihak terkait dalam program PPK itu sendiri yang meliputi: pemantauan partisipatif oleh masyarakat, pemantauan oleh konsultan dan fasilitator, dan pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah yang berwenang. **Kedua, Pemantauan Eksternal.** Adalah pemantauan yang dilakukan secara independen oleh organisasi.

Setelah Kegiatan pelaporan PPK diusahakan tepat waktu, karena menyangkut seberapa jauh keberhasilan pelaksanaannya. Adapun hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan segera diketahui oleh pihak pusat dan akan mencari alternatif jalan keluar dari permasalahan.

Mekanisme pelaporan dalam pelaksanaan PPK dilakukan melalui dua jalur yaitu: **Pertama,** Pelaporan Jalur Struktural, melibatkan beberapa pihak baik sebagai pembuat maupun penerima laporan seperti: Ketua TPK, PjOK, Camat, Tim Koordinasi PPK Kabupaten, Bupati, Tim Koordinasi PPK Propinsi dan Pusat, serta Sekretariat PPK Pusat. Dengan langkah sebagai berikut: Ketua TPK membuat laporan bulanan berisi tentang kemajuan fisik, tenaga kerja, pencairan dana untuk kegiatan sarana prasarana dan kegiatan ekonomi produktif yang ditujukan kepada PjOK. Lalu PjOK membuat laporan

akhir setiap tiga bulan sekali yang menggambarkan kondisi terakhir pelaksanaan PPK kepada Tim Koordinasi PPK Kabupaten, kemudian Tim Koordinasi PPK Kabupaten melaporkan pada Gubernur/Tim Koordinasi Propinsi, selanjutnya disampaikan pada Tim Koordinasi PPK Pusat.

**Kedua**, Pelaporan Jalur Fungsional melibatkan beberapa pihak yaitu: Fasilitator Kecamatan (FK), Konsultan Manajemen Kabupaten (KM-Kab), KM-Nasional di wilayah dan KM-Nasional di Pusat.

Pegelolaan kegiatan PPK harus dijamin memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Hasil-hasil kegiatan PPK yang berupa sarana prasarana, simpan pinjam merupakan asset bagi masyarakat yang harus dipelihara, dikembangkan dan dilestarikan. Sebagaimana sanksi yang ditentukan oleh pemerintah, jika hasil kegiatan tidak dikelola dengan baik maka desa atau kecamatan tidak akan mendapatkan lagi dana PPK untuk tahun berikutnya.

Tim pelestarian PPK Desa Mojo tetap dikendalikan oleh pengurus TPK yaitu: Ketua, Sugito; Sekretaris, Junaidi; dan Bendahara, Baitty Zubaidah.

Tujuan pelestarian seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sugito yaitu:

”Pertama, terjadinya kesinambungan tahapan kegiatan, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian kegiatan didesa. Kedua, melestarikan fungsi kelembagaan TPK sebagai perwujudan aktivitas fungsi pelestarian kegiatan di masyarakat secara berkelanjutan”. (Wawancara dengan Ketua TPK Desa Mojo tanggal 4 Juli 2007).

Langkah selanjutnya adalah pemeliharaan sarana prasarana yang telah dibangun seperti pernyataan dari Pak Heru, bahwa:

“Dalam proses pemeliharaan kegiatan PPK kami seluruh warga desa bertanggungjawab memelihara sarana prasarana yang telah dibangun untuk mencegah terjadinya kerusakan, sehingga bisa dipakai dalam jangka waktu yang lama”. (Wawancara dengan seorang warga Desa Mojo tanggal 4 Juli 2007).

Kegiatan pemeliharaan bertujuan untuk mempertahankan fungsi pelayanan, memperpanjang umur pemakaian sarana prasarana dan mengurangi biaya yang lebih besar untuk perbaikan kembalibila kondisi prasarana telah rusak.

Pedekatan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional, merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program nasional penanggulangan kemiskinan, salah satu bentuknya adalah Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

PPK merupakan program penanggulangan kemiskinan yang sudah berjalan sejak 1998 hingga sekarang, dimana hasil programnya dapat dirasakan oleh masyarakat golongan miskin. Tahun 2006 Desa Mojo mendapatkan dana PPK untuk fase III tahun anggaran 2006/2007. Dikatakan oleh Bu Andayani, mengatakan: “Manfaat yang dapat dilihat dari program ini antara lain adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui bidang pendidikan berupa pembangunan saluran irigasi dan kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan.” (Wawancara dengan Kepala Desa Mojo tanggal 5 Juli 2007).

Manfaat PPK dalam upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa Mojo seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sugito dapat dilihat dari kegiatan antara lain:

1. Pembangunan sarana prasarana yaitu pembangunan saluran irigasi. Proyek pembangunan ini mendapatkan dana langsung dari PPK dan didukung swadaya masyarakat baik berupa dana maupun tenaga. Dari hasil penelitian alasan pembangunan saluran irigasi ini karena warga Desa Mojo yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani dan buruh tani masih menggunakan saluran irigasi tradisional dan menggunakannya pun harus bergiliran.
2. Kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Desa Mojo sebagai upaya penanggulangan kemiskinan masyarakatnya yaitu kegiatan simpan pinjam bagi kelompok perempuan. Kegiatan ini dikhususkan bagi perempuan yang tergabung dalam sebuah kelompok. Dana pinjaman tersebut digunakan untuk tambahan modal usaha bagi anggota, dan tidak boleh digunakan untuk konsumtif.
3. Manfaat yang paling penting dari pelaksanaan PPK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan adalah adanya perubahan tingkat perekonomian dan taraf hidup masyarakat. (Wawancara dengan Ketua TPK Desa Mojo tanggal 5 Juli 2007).

Keterlibatan masyarakat dalam tiap tahap pelaksanaan PPK dapat menambah kemampuan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan hasil-hasil pembangunan,

seperti terwujudnya pembangunan saluran irigasi dan kegiatan ekonomi produktif atau simpan pinjam perempuan (SPP).

### **b. Penanggulangan Kemiskinan dalam Pelaksanaan Program Pengembangan (PPK) di Desa Mojo**

Setelah dana PPK diterima oleh masyarakat Desa Mojo maka langkah selanjutnya dimulailah pembangunan sarana dan prasarana maupun kegiatan ekonomi produktif berdasarkan rencana kerja kegiatan PPK di Desa Mojo:

#### **1. Pembangunan Sarana Prasarana**

Pembangunan irigasi di Desa Mojo merupakan salah satu program pelaksanaan PPK tahun anggaran 2006/2007. dengan dibangunnya saluran irigasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk para petani dalam mengairi sawah-sawah mereka.

Dalam kegiatan PPK Desa Mojo mendapatkan dana bantuan sebesar Rp 92.848.650,- untuk penbagunan saluran irigasi. Kemudian masyarakat Desa Mojo mendukungnya dengan memberikan bantuan dana swadaya sebesar Rp 5.162.100,- sehingga total dana yang digunakan untuk pembangunan saluran irigasi sebesar Rp 98.010.750,-. Daftar rencana dan realisasi kegiatan proyek secara detail dari pembangunan saluran irigasi dapat dilihat dalam lampiran1.

Alasan dibangunnya saluran irigasi ini seperti yang dikemukakan oleh Bu Sri Andayani selaku Kepala Desa Mojo, bahwa:

“Pembangunan saluran irigasi ini sangat dibutuhkan oleh banyak warga Desa Mojo karena sistem pengairan di Desa Mojo masih dengan cara bergiliran dari sawah ke sawah lainnya sesuai jadwal yang sudah disesuaikan luas sawah masing-masing”. (Wawancara dengan Kepala Desa Mojo tanggal 3 Juli 2007).

Pembangunan saluran irigasi ini dilaksanakan dengan tenaga kerja dari Desa Mojo sendiri, seperti pernyataan dari Bapak Sugito bahwa:

“Dalam pelaksanaan proyek ini tenaga kerjanya berasal dari masyarakat Desa Mojo sendiri dengan alasan memberdayakan sumber daya manusia yang tergolong miskin untuk mendapatkan lapangan pekerjaan selain itu pelaksanaan proyek ini tidak boleh adanya system tender (borongan) sehingga seluruh tenaga kerjanya berasal dari warga Desa Mojo sendiri”. (Wawancara dengan Ketua TPK Desa Mojo tanggal 3 Juli 2007).

Seluruh masyarakat Desa Mojo menyambut baik dengan adanya pembangunan saluran irigasi dengan alasan seperti dikemukakan oleh Pak Siswanto, yang mengatakan:

“Kami sangat senang dengan dibangunnya saluran irigasi ini, sebab kami para petani tidak mempunyai dana untuk membangun saluran irigasi sendiri”. (Wawancara dengan seorang warga Desa Mojo tanggal 3 Juli 2007).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bu Baiti yaitu:

“Sekarang saya tidak perlu membayar iuran Rp 1.000,00/jam pada saat menerima giliran. Dulu sebelum dibangun saluran irigasi ini, sistem pengairannya bergiliran. Tapi sekarang airnya sudah lancar. Cuma pas musim kemarau saja airnya agak kurang lancar”. (Wawancara dengan seorang warga Desa Mojo tanggal 3 Juli 2007).

Selain itu juga dikemukakan oleh Pak Marli yang memberikan pendapatnya dalam pembangunan saluran irigasi ini yaitu:

“Saya sangat setuju sekali dengan dibangunnya saluran irigasi ini karena di Desa Mojo ini kan mayoritas pekerjaan kalau ndak buruh tani ya petani. Jadi, hidup kami bergantung dari sawah. Seandainya sawah kami tidak mendapatkan pengairan yang bagus, panennya ya susah”. (Wawancara dengan seorang warga Desa Mojo tanggal 3 Juli 2007).

Dari ke empat hasil Wawancara tersebut diatas dengan jelas diketahui bahwa pembangunan saluran irigasi di Desa Mojo mendapatkan partisipasi dari masyarakat dan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh warga Desa Mojo.

## **2. Kegiatan Ekonomi Produktif**

Pemberian dana bantuan PPK Desa Mojo juga diwujudkan dalam pemberian bantuan modal usaha yang dikelola oleh kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Anggota kelompok simpan pinjam terdiri dari para kelompok perempuan “Dewi Arum”. Hal ini diungkapkan oleh Bu Nurdiana bahwa:

“Bantuan simpan pinjam ini memang dikhususkan untuk kelompok perempuan “Dewi Arum”. Jumlah pemanfaat dana ini sebanyak 5 orang (setiap kelompok terdiri dari 5 orang) yang mayoritas ekonominya menengah ke bawah sehingga sangat membutuhkan tambahan modal usaha”. (Wawancara dengan Ketua Kelompok “Dewi Arum” tanggal 3 Juli 2007).

**Tabel 12**  
**Perkembangan Pinjaman Kelompok Simpan Pinjam Perempuan**  
**Kelompok Dewi Sri**  
**Desa Mojo Tahun 2006**

No.	Nama Peminjam	Besarnya Pinjaman	Realisasi Angsuran		Tunggakan		Sisa Pokok Pinjaman
			Pokok	Bunga	Pokok	Bunga	
1.	Nurdiana	1.000.000	83.500	19.500			897.000
2.	Yulia	1.000.000	83.500	19.500			897.000
3.	Susianti	1.000.000	83.500	19.500			897.000
4.	Titah	1.000.000	83.500	19.500			897.000
5.	Lilik	1.000.000	83.500	19.500			897.000

Sumber: Laporan UPK Tahun 2006

Dengan adanya kelompok simpan pinjam ini diharapkan dapat menguatkan keberadaan kelompok perempuan dan meningkatkan ekonomi kelompok perempuan. Dikatakan pula oleh Pak Sugito, bahwa:

“Dengan adanya kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Mojo sangat membantu untuk membuka usaha. Sebenarnya prosedur permohonan pinjaman tidak sulit, jika anggota yang mau meminjam menjelaskan maksud pinjaman yaitu jenis usaha apa yang akan dikerjakan dan jika penilaiannya layak oleh pengurus maka permohonannya dapat diberikan”. (Wawancara dengan Ketua TPK Desa Mojo tanggal 3 Juli 2007).

Sehingga dengan alasan tersebut kelompok simpan pinjam “Dewi Arum” di Desa Mojo mendapatkan bantuan dana simpan pinjam dari PPK sebesar Rp 5.263.100,- ditambah dengan dana swadaya dari anggota sebesar Rp 250.000,-. Rekapitulasi realisasi anggaran biaya untuk kegiatan simpan pinjam dapat dilihat di lampiran 2.

Pengembalian pinjaman kegiatan simpan pinjam ini harus dilaporkan kepada unit pelaksana kegiatan di kecamatan. Karena dana tersebut nantinya untuk kelompok lain agar dana tersebut dapat dinikmati oleh semua golongan masyarakat miskin di Kecamatan Mojo.

Jangka waktu pengembalian dana simpan pinjam ini selama 12 bulan dengan suku bunga 18% pertahun dengan jumlah bunga Rp 900.000,-. Kegiatan ini dilakukan secara rutin dengan pembayaran sebulan sekali.

Jadi, setiap anggota simpan pinjam setiap bulannya harus mengembalikan angsuran pokok sebesar Rp 416.700,- dan angsuran bunga sebesar Rp 75.000,- dengan bunga angsuran sebesar 1,5 % perbulan.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya bantuan simpan pinjam ini adalah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dan juga dapat mengurangi pengangguran. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Nurdiana, mengatakan: “Pemberian bantuan simpan pinjam ini digunakan sebagai modal usaha bagi para anggotanya yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang, untuk pengembalian pinjaman lumayan berjalan lancar”. (Wawancara dengan Ketua “Dewi Arum” tanggal 4 Juli 2007).

Manfaat lain yang diperoleh oleh para anggota kelompok “Dewi Arum” yang meminjam dana tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Susanti, mengatakan: “Dengan adanya bantuan simpan pinjam ini sangat membantu kami yang berpenghasilan rendah. Pinjaman ini saya gunakan untuk membuka usaha pracangan agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari”. (Wawancara dengan salah seorang anggota simpan pinjam tanggal 4 Mei 2007).

Hal yang sama diungkapkan oleh Ibu Yulia, mengatakan: “Pinjaman ini saya gunakan untuk modal membuka toko alat listrik, untuk biaya sekolah anak saya”. (Wawancara dengan salah seorang anggota simpan pinjam tanggal 4 Juli 2007).

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa kegiatan simpan pinjam yang anggotanya adalah kelompok perempuan di Desa Mojo ini memberikan manfaat yang besar bagi para anggotanya. Diharapkan pengembalian pinjaman ini berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal.

### **c. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**

Berdasarkan penjelasan pada proses pelaksanaan kegiatan PPK yaitu pembangunan saluran irigasi dan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung antara lain:

#### **1. Faktor Pendukung**

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan PPK di Desa Mojo seperti yang diungkapkan oleh Pak Sugito selaku Ketua TPK antara lain:

- a. Adanya keikutsertaan masyarakat Desa Mojo yang telah memberikan bantuan tenaga dalam mengerjakan pembangunan saluran irigasi.
- b. Dalam pelaksanaan PPK di Desa Mojo didukung pula adanya kerjasama dengan masyarakat maka perencanaan, pelaksanaan bahkan sampai dengan pemeliharaan proyek PPK dapat berjalan lancar dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat jhususnya masyarakat miskin.
- c. Adanya kelancaran dalam sistem pengembalian pinjaman untuk kegiatan simpan pinjam dari setiap anggotanya.
- d. Adanya dukungan transparansi dari pihak pelaku PPK dan pemerintah desa dalam setiap kegiatan sehingga pelaksanaan program PPK di Desa Mojo disambut baik oleh masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

## **2. Faktor Penghambat**

Keberhasilan pelaksanaan PPK di Desa Mojo bukan tanpa hambatan. Dalam pelaksanaan PPK terdapat hambatan, yaitu:

1. Pada saat pengerasan makadam dengan menggunakan wareles sempat tertunda, dikarenakan peminjaman wareles di dinas kimpraswil harus antri. Di dinas kimpraswil sendiri hanya mempunyai tiga buah wareles. Desa Mojo harus antri menunggu giliran agak lama karena tiga wareles yang disediakan dinas kimpraswil masih digunakan di empat kecamatan.

## **B. Analisis dan Interpretasi Data**

### **a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Mojo**

#### **1. Tahap Perencanaan**

Berdasarkan teori kemiskinan, faktor kemiskinan di Desa Mojo yang paling menonjol adalah faktor ketidakberdayaan yang terkait dengan pengambilan keputusan. Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan mencari sumber masalah dan sumber kesalahan yang bersumber dari individu penyandang masalah. Melalui pendekatan kemiskinan tersebut, dapat diidentifikasi sumber masalah kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, maupun rendahnya penguasaan skill. Sesuai dengan tujuan umum dalam tubuh PPK yaitu penanggulangan kemiskinan berdasarkan pengembangan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas

masyarakat, pemerintahan lokal, serta penyediaan sarana prasarana dan ekonomi, maka penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan cara perbaikan dan pembangunan fisik di wilayah sasaran, misalnya pembangunan saluran irigasi. Sedangkan dalam pengembangan ekonomi penanggulangannya berupa pinjaman dana bergulir.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan diketahui sasaran PPK adalah penduduk miskin dengan criteria jumlah desa tertinggi di kecamatan lebih besar. Pemerintah Kabupaten menetapkan prioritas lokasi kecamatan dan selanjutnya mengimplikasikan usulan kepada Propinsi dan Propinsi menyampaikan kepada pemerintah pusat.

Dari hasil penelitian yang didapat dari Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ada 15 desa yang memperoleh dana PPK dengan total dana sebesar Rp 1.000.000.000,-. Setiap desa memperoleh dana yang berbeda-beda sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa dalam persiapan pelaksanaan PPK di Desa Mojo melalui proses sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan dalam forum MD I.

Sosialisasi merupakan tahap penting dari pelaksanaan PPK guna mendukung keberhasilan proses dan kegiatan yang dilakukan pada tahap-tahap berikutnya. Hasil MD I yang dilakukan Desa Mojo yaitu mensosialisasikan atau mempublikasikan kepada masyarakat tentang informasi pokok PPK yang meliputi: tujuan, prinsip, pendanaan, proses dan prosedur yang dilakukan serta menentukan pelaku-pelaku PPK.

Apabila mengamati proses sosialisasi pelaksanaan PPK di Desa Mojo ini dilaksanakan dengan cukup baik oleh para pelaku PPK. Selain melalui forum dan pertemuan formal kegiatan lain yang dilaksanakan adalah memasang papan informasi tentang PPK yang diletakkan pada tempat-tempat yang sekiranya mudah dilihat oleh masyarakat. Hal ini bertujuan sebagai pendukung sosialisasi dan penerapan prinsip transparansi.

Penggalian gagasan dilakukan melalui musyawarah kepada kelompok masyarakat dan dusun setelah mendapatkan sosialisasi tentang PPK dari para pelaku PPK. Tahap penggalian gagasan ini digunakan untuk mengetahui program pembangunan apa yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari penggalian gagasan diperoleh tiga usulan kegiatan yaitu pembangunan saluran irigasi, pembangunan gedung TK dan simpan pinjam. Kegiatan simpan pinjam ini merupakan aspirasi khusus dari kelompok perempuan sebagai bagian usulan yang diajukan pada MD I. kemudian usulan hasil musyawarah tersebut dilaporkan dalam MD II.

Dari usulan kegiatan MD I yang berasal kemudian dikompetisikan untuk mendapatkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan criteria dan aturan yang telah disepakati. Pelaksanaan MD II berjalan dengan lancar menghasilkan antara lain:

- a. Menetapkan dan mengesahkan usulan kegiatan yang disepakati dan mendapatkan rangking tertinggi dalam MD II.
- b. Menetapkan Tim Penulis Usulan yang bertugas menguraikan secara tertulis gagasan setiap kegiatan untuk dikompetisikan kembali pada MAD II.
- c. Disepakati wakil-wakil desa yang akan hadir dalam MAD II.

Kemudian dalam MAD II yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan berhasil menetapkan urutan atau peringkat usulan dari tiap desa sesuai skala prioritas yang telah disepakati. Usulan kegiatan yang telah dibuat peringkatnya dalam MAD II selanjutnya dilakukan pembuatan dan penyempurnaan desain serta RAB diluar kegiatan simpan pinjam.

Dalam proses pembuatan desain dan RAB ini, Tim Penulis Usulan dibantu oleh Fasilitator Kecamatan dengan melibatkan Pendamping Lokal, Fasilitator Desa, TPK, dan anggota masyarakat kelompok mengusulkan menilai usulan kegiatan yang layak untuk mendapatkan dan PPK kemudian akan dibahas dalam MAD III.

MAD III adalah forum ditingkat kecamatan untuk membahas dan menetapkan alokasi dana kegiatan berdasarkan peringkat usulan kegiatan yang disetujui dalam MAD II, dan pembuatan desain dan RAB kegiatannya.

Hasil dari MAD III kemudian dibahas dalam MD III. Selanjutnya dalam MD III tersebut dialokasikan kembali penetapan alokasi dana bagi desa yang berhak mendapatkan dana PPK, untuk Desa Mojo jenis kegiatan yang mendapatkan dana PPK adalah sarana prasarana dengan dibangunnya saluran irigasi dan kegiatan simpan pinjam

kelompok perempuan. Langkah selanjutnya adalah pembuatan jadwal pelaksanaan kegiatan, pengadaan tenaga kerja dan menetapkan susunan lengkap TPK Desa Mojo.

## **2. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan MAD III dan MD III berdasarkan hasil desain dan RAB masing-masing kegiatan, untuk menjamin kualitas pelaksanaan PPK Desa Mojo tetap mengacu pada prinsip dan azas PPK yang selanjutnya dilakukan proses pencairan dana.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa sumber pembiayaan PPK tahun anggaran 2006/2007 berasal dari pemerintah (APBN, Pinjaman Luar Negeri, dan APBD) dan kontribusi dari masyarakat (swadaya masyarakat dan swasta). Mekanisme pencairan dan penyaluran dana PPK mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan.

Pada prinsip dana PPK disalurkan kepada masyarakat melalui rekening kolektif desa yang dikelola melalui Unit Pengelola keuangan (UPK) di kecamatan kemudian disalurkan langsung ke desa melalui TPK. Pencairan dana PPK Desa Mojo tahun anggaran 2006/2007 melalui rekening BRI unit Mojo di Kecamatan Mojo selanjutnya diserahkan kepada ketua TPK Desa Mojo secara utuh dengan jumlah sebesar Rp 98.111.750,- melalui tiga tahap pencairan dana yaitu Tahap I 40%, Tahap II 40%, Tahap III 20%.

## **3. Tahap Pelestarian**

Pemantauan jalannya kegiatan PPK Desa Mojo dilaksanakan oleh FD, FK serta Tim 18 yang beranggotakan masyarakat didalam PPK untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prinsip dan prosedur PPK. Kegiatan pemantauan dimulai dari sebelum kegiatan PPK dilaksanakan sampai dengan kegiatan dilaksanakan. Pemantauan di Desa Mojo sering dilakukan dalam bentuk kunjungan kelapangan, bertujuan mengadakan cross cek antara laporan tertulis dan keadaan yang berkembang dilapangan. Untuk itu bentuk kunjungan sifatnya ada yang terjadwal dan ada yang bersifat mendadak.

Pelaporan pelaksanaan kegiatan PPK sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu program kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu memperoleh informasi yang lengkap sekaligus dapat mempercepat proses penyampaian data dan informasi dari

lapangan atau desa ke tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi dan pusat. Pelaporan ini dilakukan melalui 2 jalur yakni struktural dan fungsional.

Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan Desa Mojo dibuat dan ditandatangani oleh ketua TPK dan FK untuk menyatakan bahwa seluruh kegiatan telah selesai dilaksanakan (kondisi 100%). Hasil pemantauan dan pelaporan dapat dijadikan dasar untuk evaluasi pelaksanaan program di desa maupun kecamatan serta sebagai dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan mengatasi hambatan yang terjadi.

Sebagaimana dalam petunjuk operasional pelestarian kegiatan merupakan tahapan pasca pelaksanaan yang dikelola dan merupakan tanggungjawab masyarakat. Seluruh hasil kegiatan PPK yang telah dilaksanakan oleh masyarakat wajib dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses pelestarian kegiatan PPK di Desa Mojo mendapatkan dukungan dari seluruh masyarakat. Untuk memelihara hasil-hasil pembangunan tersebut seluruh masyarakat beserta pelaku PPK dan aparat pemerintah desa berperan aktif dalam memelihara hasil pembangunan sehingga secara terus menerus dimanfaatkan oleh masyarakat secara aktif dan efisien.

## **b. Upaya Penanggulangan Kemiskinan dalam Pelaksanaan Program Pengembangan (PPK) di Desa Mojo**

### **1. Pembangunan Sarana Prasarana**

Pembangunan saluran irigasi untuk sarana pengairan sawah-sawah di Desa Mojo mendapatkan dukungan yang sangat besar dari masyarakat. Dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa alokasi dana PPK tahun anggaran 2006/2007 yang diterima oleh Desa Mojo sebesar Rp 92.484.650,-. Pembangunan saluran irigasi ini terlaksana atas dukungan swadaya masyarakat sebesar Rp 5.162.100,-. Jadi total dana untuk pembangunan saluran irigasi sebesar Rp 98.010.750,-.

Upaya Desa Mojo dalam merealisasikan pembangunan saluran irigasi dilakukan dengan gotong royong oleh masyarakat karena tenaga kerjanya berasal dari masyarakat Desa Mojo sendiri yang berjumlah 64 angkatan kerja yang terbagi dari 16 kelompok kerja. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 pekerja dan 1 tukang dan kepala tukang yang semuanya warga Desa Mojo yang umumnya termasuk keluarga miskin. Yang masing-masing mendapatkan upah, pekerja Rp 13.500,- tukang Rp 20.000,- kepala

tukang Rp 22.500,-. Ukuran bangunan saluran irigasi sudah sesuai dengan rencana yang diusulkan dalam daftar usulan proyek yaitu  $0,3 \times 1 \times 1,032 \text{ m}^3$ .

Adanya keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan pembangunan merupakan suatu hal yang positif dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pelaksanaan proyek yang tenaga kerjanya dari masyarakat sendiri dengan cara gotong royong merupakan yang paling tepat dan sesuai dengan tujuan diberikannya bantuan PPK yaitu untuk mendorong, dan memberdayakan sumber daya manusia yang tergolong miskin untuk memperoleh lapangan pekerjaan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan dari data diperoleh gambaran bahwa pembangunan saluran irigasi di Desa Mojo telah berhasil dilaksanakan. Maka dengan dibangunnya saluran irigasi ini dapat dipergunakan para petani untuk mengairi sawah-sawah mereka dengan lancar.

## **2. Kegiatan Ekonomi Produktif**

Sebagaimana dalam petunjuk operasional pengertian kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan adalah kegiatan kelompok perempuan dipedesaan dalam mengelola modal atau keuangan milik bersama untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam rangka meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat.

Kelompok simpan pinjam ini mendapatkan dana PPK sebesar Rp 5.263.100,- sedangkan dana swadaya yang berasal dari anggotanya sebesar Rp 250.000,- Jumlah anggota pemanfaat dana simpan pinjam sebanyak 5 orang berdasarkan dari tingkat penghasilan yang tergolong rendah dari masing-masing anggotanya.

Berdasarkan dari data yang diperoleh dapat diketahui bahwa pelaksanaan simpan pinjam kelompok “Dewi Arum” Desa Mojo berjalan dengan lancar. Pengembalian pinjaman dibayarkan oleh kelompok melalui TPK untuk diteruskan kepada UPK dengan jangka pengembalian selama 12 bulan yang dibayarkan secara rutin para anggotanya setiap bulan.

Kelancaran pengembalian pinjaman tersebut didukung oleh kesadaran dari para anggotanya akan tanggung jawab mereka untuk mengembalikan pinjaman setiap bulannya dengan harapan pinjaman tersebut benar-benar bermanfaat.

Dana tersebut digunakan untuk kegiatan perluasan kesempatan dan peluang usaha diharapkan dapat menjadi modal yang mudah dijangkau dan bermanfaat secara berkelanjutan terutama bagi kelompok perempuan dipedesaan.

Berdasarkan pada teori pembangunan, paradigma yang masih diterapkan dalam pengentasan kemiskinan selama ini masih menerapkan paradigma ekonomi. Untuk mengejar ketertinggalannya, negara yang sedang berkembang berusaha meningkatkan *Gross National Product* (GNP) per kapita yang cukup tinggi. Karakter kebijakannya masih bercorak teknokratik-birokratis dimana model ekonomi dan statistika memiliki peran yang sangat besar. Biasanya para pejabat pemerintah selalu berada dibarisan terdepan dan mengabaikan partisipasi lain (misalnya masyarakat setempat). Lemahnya suara dan aspirasi masyarakat lama kelamaan akan mendorong perilaku masyarakat untuk semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam diri masyarakat itu sendiri secara bersama.

Ketidakberhasilan paradigma tersebut memicu munculnya paradigma pembangunan yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat (*people centered development*). Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan adalah merupakan bagian integral dari paradigma baru pembangunan. Adanya perubahan di bidang politik sejak dicetuskannya reformasi di tingkat nasional memungkinkan terjadinya perubahan tatanan politik dari otoritarian kepada tatanan politik yang demokratis. Konsekuensi dari perubahan ini adalah tuntutan demokratis di dalam melaksanakan pembangunan daerah yang hanya berjalan dengan baik apabila diikuti melalui proses pemberdayaan masyarakat. Disamping itu akan menghilangkan keperkasaan segelintir pejabat di tingkat pemerintahan pusat dan akan lebih memperhatikan ketidakberdayaan si miskin sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama bukan saja di tingkat aparatur pemerintah melainkan masyarakat secara keseluruhan. Paradigma pembangunan yang berpusat manusia memberikan aksentuasi pada peran individu manusia sebagai aktor yang menentukan tujuan pembangunan, menguasai sumber-sumber dan mengarahkan proses pembangunan yang menentukan hidup mereka. Paradigma (*people centered development*) ini lebih menekankan pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri. Oleh karena itu dalam program PPK mengedepankan aspek masyarakat, dimana masyarakat tidak hanya menjadi obyek pembangunan namun juga sebagai subyek dalam pembangunan.

Rakyat merupakan target atau sasaran dalam proses pembangunan, kemakmuran atau kesejahteraan rakyat adalah tujuan pembangunan. Sebuah program dapat dikatakan

berhasil apabila *target group* dapat mendapatkan manfaat dari program tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan sangat penting artinya. Tidak hanya pada pelaksanaan program pembangunan melainkan juga berpengaruh terhadap keberlangsungan program serta terpeliharanya hasil-hasil pembangunan.

### **c. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK)**

#### **1. Faktor Pendukung**

Pada dasarnya pelaksanaan PPK di Desa Mojo sangat terbuka untuk semua masyarakat. Dalam keberhasilan program ini didukung oleh 4 faktor yaitu adanya partisipasi masyarakat, adanya kerjasama dengan pemerintah desa, kelancaran pengembalian dana simpan pinjam, dan yang terakhir adanya transparansi dari pelaku PPK. Dari keempat faktor tersebut diharapkan dapat mewujudkan keberhasilan program PPK Desa Mojo.

Secara normatif asumsi yang mendasari bahwa diperlukan adanya partisipasi masyarakat yaitu bahwa masyarakat lokal harus memperoleh proyek dan program pembangunan yang mereka tentukan sendiri. Asumsi normatif ini didasari oleh asumsi deduktif bahwa masyarakat lokal yang paling tahu apa yang menjadi masalah dan kebutuhannya dan mereka memiliki hak dan kemampuan untuk menyatakan pikiran dan kehendaknya tadi. Dengan demikian, apabila program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan di tingkat lokal didasari oleh keputusan yang diambil masyarakat sendiri maka program tersebut akan lebih relevan dan lebih menyentuh permasalahan dan kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan merupakan pencerminan bahwa dalam pembangunan masyarakat lebih memfokuskan perhatian pada aspek manusia dan masyarakatnya, bukan semata-mata pada hasil secara fisik materiil. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program, serta dalam evaluasi dan menikmati hasil.

Adanya partisipasi masyarakat secara aktif terutama keterlibatan dalam mengerjakan pembangunan saluran irigasi. Bantuan tenaga dari masyarakat membuktikan bahwa

sebenarnya masyarakat memiliki kepedulian dan tanggungjawab yang besar dalam mendukung proyek pembangunan didesanya. Disamping itu didukung pula kerjasama dari pihak pemerintah desa dalam memfasilitasi dan memberikan pengarahan mulai tahap perencanaan sampai tahap pelestarian. Sehingga hasil dari proyek PPK dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Desa Mojo khususnya masyarakat miskin.

Untuk kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan pengembalian pinjaman berjalan lancar setiap bulannya karena didasari rasa tanggungjawab setiap anggotanya demi suksesnya kegiatan simpan pinjam.

Pengelolaan seluruh kegiatan PPK Desa Mojo baik kegiatan pembangunan saluran irigasi maupun kegiatan simpan pinjam dilakukan secara transparan (terbuka) oleh pelaku PPK dan aparat pemerintah desa dan diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini sangat penting karena dengan transparansi tersebut maka segala sesuatunya akan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

## **2. Faktor Penghambat**

Dalam kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan selalu ditemui hambatan-hambatan. Hambatan yang timbul sebagai akibat terjadinya ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dilakukan dengan kenyataan yang terjadi.

Berdasarkan data yang diperoleh hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan PPK di Desa Mojo adalah pengerasan makadam yang tertunda karena harus antri dalam meminjam wareles di Dinas Kimpraswil.

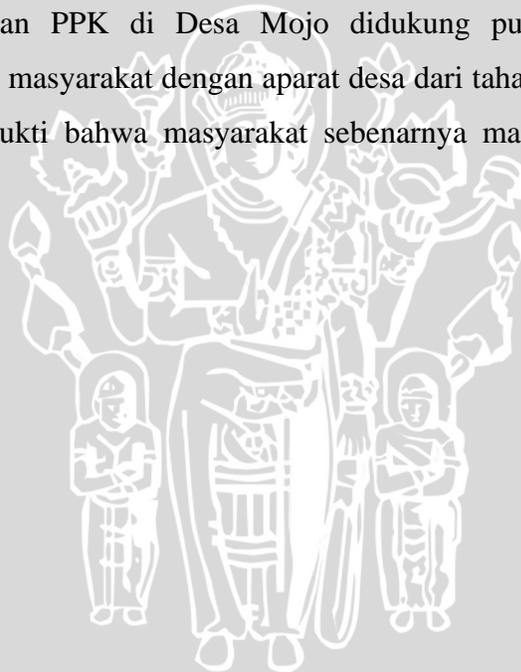
Dari kenyataan ini perlu diperhatikan bahwa komponen sekecil apapun harus diperhatikan dengan seksama. Dengan adanya masalah peminjaman wareles, sehingga pengerasan makadam terlambat juga. Tetapi keterlambatan pengerasan makadam itu tidak sampai memakan waktu yang cukup lama, hanya 2 hari kemudian Desa Mojo bisa meminjam wareles milik Dinas Kimpraswil setelah selesai digunakan kecamatan lain.

Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pembangunan dari dana PPK pada tahun-tahun berikutnya dalam mencari pinjaman wareles lebih baik sebelum pelaksanaan pembangunan sarana prasarana dilaksanakan sudah disediakan. Dengan begitu pembangunan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana.

Berdasarkan data hasil penelitian pelaksanaan PPK di Desa Mojo tahun anggaran 2005/2006 bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa agar dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri serta peningkatan penyediaan infrastruktur sosial ekonomi masyarakat.

Sasaran penerima manfaat utama dari PPK adalah kelompok penduduk miskin dipedesaan dengan memperhatikan kelompok perempuan. Pelaksanaan PPK di Desa Mojo telah memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan desa ini. PPK telah memberikan manfaat berupa sarana prasarana serta meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat Desa Mojo melalui kegiatan simpan pinjam khusus perempuan.

Keberhasilan pelaksanaan PPK di Desa Mojo didukung pula dengan adanya kerjasama serta swadaya dari masyarakat dengan aparat desa dari tahap persiapan sampai pelestarian, telah menjadi bukti bahwa masyarakat sebenarnya mampu dan potensial melakukan pembangunan.



## BAB V PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan dapat diambil kesimpulan dan saran-saran yang kiranya bermanfaat dalam usaha meningkatkan mekanisme kegiatan PPK dalam menunjang pembangunan di Desa Mojo.

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan penulis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) di Desa Mojo Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri yang dimulai sejak bulan September 2006 sampai dengan Nopember 2006 cukup berhasil. Dari tahap perencanaan sampai pelestarian berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan. Hal ini bisa dilihat dari berhasil dibangunnya saluran irigasi yang manfaatnya dirasakan sangat besar bagi masyarakat Desa Mojo yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Selain itu PPK sebagai upaya penanggulangan kemiskinan juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Mojo, khususnya kaum perempuan dengan adanya bantuan simpan pinjam kelompok perempuan karena pinjaman ini dapat menambah modal usaha. Jika dilihat dari tujuan dan prinsip PPK yaitu memberdayakan dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta adanya keberpihakan pada kelompok perempuan. Maka PPK di Desa Mojo ini sudah cukup berhasil sebab mulai dari awal tahap kegiatan yang sosialisasi sampai dengan tahap pelestarian, semua masyarakat desa terlibat di dalamnya termasuk kelompok perempuan.
2. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PPK di Desa Mojo adalah proses pengerasan makadam terhambat dikarenakan peminjaman wareles harus antri. Sedangkan wareles yang disediakan Dinas Kimpraswil hanya tiga buah, maka harus antri menunggu giliran.

### B. Saran

Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan PPK di Desa Mojo, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya pelaku PPK dan pemerintah desa memberikan penjelasan kepada masyarakat dalam penggalian dana swadaya tentang betapa pentingnya

sumbangan swadaya dari masyarakat sendiri untuk meningkatkan pembangunan desanya selain dana pemberian pemerintah.

2. Agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih baik maka koordinasi antara dinas atau instansi pelaksana dengan pihak kecamatan, pihak desa dan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi.
3. Terakhir yang harus tetap dijaga dan dikembangkan adalah kerjasama dari masyarakat dan aparat dalam memsukkseskan program ini (PPK) dengan saling bersikap terbuka dan berusaha dengan sebaik-baiknya agar tujuan program ini dan pembangunan pada umumnya yaitu upaya penanggulangan kemiskinan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.R. 2003. *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Andarwati, dkk. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Desa Melalui Operasi Pasar Khusus Beras (Studi Pada Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Desa Kenep, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk)*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.16 No.1
- Achmadi, dkk. 1994. *Kebijakan Publik dan Pembangunan*. Malang: IKIP Malang
- Halim, Abdul.2004. *Bunga Rampai: Manajemen Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta: BPFE
- Handoko, T. Hani, 1984, *Manajemen Edisi 2*, Yogyakarta, BPFE
- Haryadi, et, al.2002. *Jawa Timur: Menuju Daerah Otonom*. Surabaya: STIA PERBANAS
- Isfa, M.Y. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia*. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol.3 No.2
- Islamy, M.I. 2004. *Membangun Masyarakat Partisipatif*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Vol. IV No.2
- Kaho, Josef Riwu, 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005. Jakarta: Balai Pustaka
- Karnesih, E. 2005. *Pengentasan Penduduk Miskin Sebagai Refleksi Pelaksanaan Otonomi Daerah Jawa Barat*. *Jurnal Ilmu Sosial Humaniora*, Vol.7 No.3
- Koentjaraningrat, 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia
- Moleong, Lexy.J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI press
- Misbach, I. 2004. *Potret Kemiskinan Perkotaan di Jawa Timur*. *Berkala Ilmiah Kependudukan*, Vol.6 No.1

- Prasojo, E. 2004. *Poeple and Society Empowerment: Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Vol. IV No.2
- Puspaningrum, A, dkk. 2001. *Strategi Keluarga Miskin dalam Menanggulagi Rendahnya Tingkat Penghasilan di Daerah Perkotaan Jawa Timur*. Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.13 No.2
- Suparlan, P. 1984. *Kemiskinan di Perkotaan: Bacaan untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan
- Soeprapto, R. 2000. *Administrasi Pembangunan*. Malang: UM Press
- Soeprapto, R.2001. *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance (The Capacity Building For Local Government Toward Good Governance)*. Dalam Jurnal Administrasi Publik. Malang: FIA-UNIBRAW
- Soekamto, H. 2002. *Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang)*. Malang: Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Brawijaya
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Suryono, A. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang
- Sulitstiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Gava Media
- Widodo, Joko.2001.*Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontabilitas pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Suranaya. Insan Cendikia
- Zauhar, Susilo, 1993, *Administrasi dan Proyek Pembangunan*, IKIP, Malang

**DAFTAR RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN**  
**PROGRAM PENGEMBANGAN KECAMATAN (PPK)**  
**KABUPATEN KEDIRI – JAWA TIMUR**

Desa : Mojo  
 Kecamatan : Mojo

RENCANA				REALISASI						
No	Jenis Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Biaya		Volume	Satuan	Sumber Biaya		
				PPK (Rp)	Swadaya (Rp)			PPK (Rp)	Swadaya (Rp)	Total (Rp)
<b>A</b>	<b>Biaya Fisik</b>									
a	Bahan	47.585.600		3.720.000		51.305.600		45.820.650	3.720.000	49.540.650
b	Upah	40.620.650		1.442.100		42.062.750		42.333.600	1.442.100	43.775.700
c	Alat							52.000		52.000
		88.206.250						88.206.250		93.368.350
	Sub Total A	88.206.250		5.162.100		93.368.350		88.206.250	5.162.100	93.368.350
<b>B</b>	<b>Biaya Operasional</b>									
1	Ops UPK 2 %	1.856.950				1.856.950		1.856.950		1.856.950
2	Ops TPK 3 %	2.785.450				2.785.450		2.785.450		2.785.450
	Sub Total B	4.642.400				4.642.400		4.642.400		
	Total A + B	92.848.650		5.162.100		98.010.750		92.848.650	5.162.100	98.010.750

Mojo, 9 Nopember 2006  
 Dibuat Oleh  
 Ketua TPK Desa Mojo

HENING ANDWIASWARI ST  
 FKT

ALI MUHSIN A. S Pd  
 FKT

SUGITO



Foto 1  
Musyawarah Antar Desa II



Foto 2  
Musyawarah Desa I



Foto 3  
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana: Irigasi  
Keadaan: 0%



Foto 4  
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana: Irigasi  
Keadaan: 50%



Foto 5  
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana: Irigasi  
Keadaan: 100%



Foto 1  
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana: Irigasi  
Keadaan: 0%



Foto 2  
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana: Irigasi  
Keadaan: 50%



Foto 3  
Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana: Irigasi  
Keadaan: 100%



## INTERVIEW GUIDE

1. Kapan dimulainya pelaksanaan PPK dan berapa lama?
2. Apa yang menjadi latar belakang Desa Mojo mengajukan usulan mendapatkan bantuan PPK?
3. Bagaimanan persiapan PPK Desa Mojo dan siapa saja yang terlibat?
4. Bagaimana proses sosialisasi PPK oleh para pelaku PPK kepada masyarakat Mojo?
5. Bagaimana proses perencanaan PPK Desa Mojo mulai dari penggalian gagasan, MD I, MD III, MAD II, MAD III?
6. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan PPK Desa Mojo?
7. Bagaimanan pelaksanaan PPK tersebut dan apa alasannya?
8. Apa manfaat yang diperoleh dari dilaksanakannya kegiatan PPK?
9. Bagaimana proses pemantauan dan pelaporan pelaksanaan PPK dan apa tujuan pemantauana tersebut?
10. Bagaimana proses pelestarian PPK dan apa tujuan dari pelestarian tersebut?
11. Apa saja faktor pendukung dan factor penghambat pelaksanaan PPK?